



PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

44
5

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
1991



PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

**PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
1991**



PUSAT PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGAN BAHASA

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
Klasifikasi 353.844 pus p	No. Induk : 634 Tgl. : 25/10/2007 Ttd. : _____

KATA PENGANTAR

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang dibentuk pada bulan Mei 1975 sebagai ganti Lembaga Bahasa Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia melalui kegiatan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Masalah kebahasaan yang menjadi garapan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bertalian dengan bahasa nasional, bahasa daerah, dan—dalam batas tertentu—bahasa asing di Indonesia.

Kesadaran terhadap betapa luasnya cakupan dan beratnya tugas itu mendorong Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berusaha membina dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan lain di dalam dan di luar negeri, baik pemerintah maupun swasta. Berkat jaringan kerja sama itu, dalam waktu lima belas tahun telah dihasilkan, antara lain, lebih dari 1000 laporan penelitian bahasa dan sastra, lebih dari 190.000 istilah berbagai bidang ilmu pengetahuan, empat jenis kamus ilmu dasar (fisika, matematika, biologi, dan kimia), kamus-kamus bahasa daerah-Indonesia, buku-buku pedoman dan acuan, serta sekitar lima ratus orang tenaga kebahasaan yang terampil dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra.

Hasil yang sangat penting yang dipersembahkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah tersebarluasnya edisi perdana *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* pada bulan Oktober 1988 dalam rangka penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia V.

Kesungguhan dan kerja keras yang diperlihatkan oleh pimpinan dan karyawannya dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan selama dasawarsa pertama, baik yang berupa penyuluhan maupun yang berupa

pertemuan kebahasaan, seperti seminar, konferensi, kongres, dan simposium, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah berhasil menarik simpati berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas sebagai lembaga kebahasaan yang patut dianut merupakan prestasi yang mencolok selama kurun waktu lima belas tahun terakhir ini.

Kini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memasuki dasawarsa kedua dengan langkah yang lebih mantap. Pengalaman pada kurun waktu lima belas tahun telah memungkinkan lembaga ini tumbuh menjadi lebih dewasa. Kalau pada dasawarsa pertama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah berhasil menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada dasawarsa kedua Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bertekad untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas masyarakat pemakai bahasa Indonesia yang baik dan benar serta berupaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia dan daerah.

Jakarta, Januari 1991

Lukman Ali
Kepala Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Sejarah Singkat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	1
1.2 Permasalahan Kebahasaan di Indonesia	4
1.3 Arah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra.	5
1.3.1 Arah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	5
1.3.2 Arah Pembinaan dan Pengembangan Sastra.	6
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI	8
2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.	8
2.2 Susunan Organisasi	9
2.3 Unit Pelaksana Teknis	14
2.4 Struktur Organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa .	15
BAB III KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	16
3.1 Dasar Kebijakan	16
3.2 Organisasi	16
3.3 Ketenagaan	16
3.4 Pembinaan Bahasa dan Sastra.	17
3.4.1 Pembinaan Bahasa	17
3.4.2 Pembinaan Sastra	17
3.5 Pengembangan Bahasa dan Sastra	18
3.5.1 Pembakuan	18
3.5.2 Penelitian.	18
3.6 Kerja Sama Kebahasaan	18
3.7 Prasarana dan Sarana	19
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM	20
4.1 Organisasi	20

4.2 Ketenagaan	22
4.2.1 Peningkatan Kuantitas	22
4.2.2 Peningkatan Kualitas	23
4.2.2.1 Penataran.	23
4.2.2.2 Pendidikan.	25
4.2.2.3 Partisipasi dalam Pertemuan Kebahasaan	25
4.3 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	25
4.3.1 Penyuluhan	26
4.3.1.1 Penyuluhan melalui TVRI dan RRI.	26
4.3.1.2 Penyuluhan melalui Surat dan Telepon	26
4.3.1.3 Penyuluhan Bersemuka.	27
4.3.2 Penyusunan	27
4.3.3 Penelitian.	27
4.3.4 Pertemuan Kebahasaan.	27
4.3.4.1 Kongres Bahasa.	27
4.3.4.2 Bulan Bahasa	31
4.3.4.3 Pertemuan Lain.	32
4.3.5 Kerja Sama Kebahasaan	33
4.3.5.1 Kerja Sama dengan ILDEP II.	33
4.3.5.2 Kerja Sama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam.	33
4.3.5.3 Kerja Sama dengan Pemerintah DKI Jakarta.	33
4.3.5.4 Kerja Sama dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional	34
4.3.6 Penerbitan	34
4.4 Prasarana dan Sarana	34
4.4.1 Gedung dan Perlengkapan Kantor.	34
4.4.2 Perpustakaan	35
4.4.3 Peralatan Teknis	35
BAB V RENCANA DAN PROGRAM KERJA.	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Pejabat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.	37
2. Grafik Keadaan Pegawai	38
3. Grafik Hasil Penelitian	39
4. Daftar Bahasa Daerah di Indonesia	40
5. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia I, II, III, IV, dan V	43
6. Hasil Mabbim	92
7. Peta Lokasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.	95

BAB I PENDAHULUAN

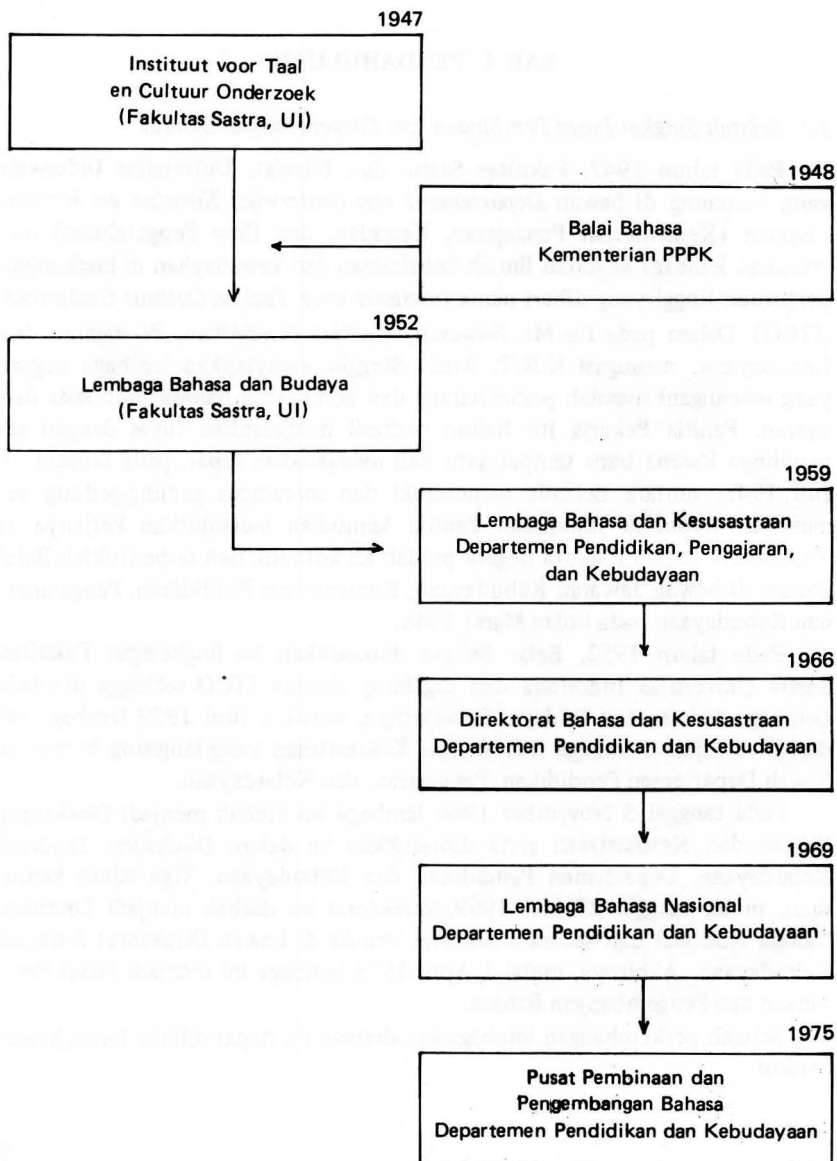
1.1 Sejarah Singkat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Pada tahun 1947, Fakultas Sastra dan Filsafat, Universitas Indonesia yang bernaung di bawah *Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen* (Kementerian Pengajaran, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan) meresmikan lembaga kegiatan ilmiah kebahasaan dan kebudayaan di lingkungan perguruan tinggi yang diberi nama *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (ITCO). Dalam pada itu Mr. Suwandi, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, menugasi K.R.T. Amin Singgih menyiapkan lembaga negara yang menangani masalah pemeliharaan dan pembinaan bahasa Indonesia dan daerah. Panitia Pekerja itu belum berhasil menjalankan tugas dengan sepenuhnya karena baru sempat satu kali mengadakan rapat, pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda menduduki dan merampas gedung-gedung pemerintah Republik Indonesia. Panitia kemudian melanjutkan kerjanya di Yogyakarta ketika ibukota negara pindah ke kota itu, dan terbentuklah Balai Bahasa di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada bulan Maret 1948.

Pada tahun 1952, Balai Bahasa dimasukkan ke lingkungan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan digabung dengan ITCO sehingga menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya. Selanjutnya, mulai 1 Juni 1959 lembaga ini diubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang langsung berada di bawah Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Pada tanggal 3 November 1966 lembaga ini diubah menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan serta dimasukkan ke dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tiga tahun kemudian, mulai tanggal 27 Mei 1969, direktorat ini diubah menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Akhirnya, mulai 1 April 1975 lembaga ini menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Sejarah perkembangan lembaga kebahasaan itu dapat dilihat dalam bagan berikut.

BAGAN PERKEMBANGAN LEMBAGA KEBAHASAAN

**Daftar Nama Pemimpin Lembaga
Kebahasaan dan Kesastraan
Tahun 1947 — 1989**

No.	N a m a	Lembaga	Periode
1.	Prof. Dr. G.J. Held	Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO)	1947 — 1952
2.	Prof. Dr. Prijana	Lembaga Bahasa dan Budaya	1952 — 1957
3.	Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat	Lembaga Bahasa dan Budaya	1957 — 1959
4.	Prof. Dr. P. A. Hoesein Djajadiningrat	Lembaga Bahasa dan Kesastraan	1959 — 1960
5.	Dra. Lukijati Gandasubrata	Lembaga Bahasa dan Kesastraan	1960 — 1962
6.	Dra. Moliar Achmad	Lembaga Bahasa dan Kesastraan	1962 — 1966
7.	Dra. S.W. Rujati Mulyadi	Direktorat Bahasa dan Kesastraan	1966 — 1969
8.	Dra. S.W. Rujati Mulyadi	Lembaga Bahasa Nasional	1969 — 1970
9.	Drs. Lukman Ali	Lembaga Bahasa Nasional	1970 — 1971
10.	Dra. S.W. Rujati Mulyadi	Lembaga Bahasa Nasional	1971 — 1975
11.	Prof. Dr. Amran Halim	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	1975 — 1984
12.	Prof. Dr. Anton M. Moeliono	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	1984 — 1989
13.	Drs. Lukman Ali	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	1989 —

1.2 Permasalahan Kebahasaan di Indonesia

Tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Dalam hubungan itu, pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan sebagai bagian integral pembangunan nasional harus dilaksanakan seirama dengan pembangunan pada sektor-sektor lain.

Untuk menunjang terwujudnya tujuan nasional itu, bahasa dan sastra sebagai unsur kebudayaan nasional dan modal budaya bangsa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan berdasarkan kebijaksanaan nasional tentang bahasa yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 dan penjelasannya, yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara, dan bahwa bahasa daerah yang dipakai sebagai alat perhubungan dan dipelihara oleh masyarakat pemakainya dilindungi dan dibina juga oleh negara sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup.

Sementara itu, pemakaian dan pengajaran bahasa-bahasa asing yang lazim dipakai di dalam hubungan antarbangsa, terutama dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada umumnya dan dalam lingkungan Persatuan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada khususnya, serta di dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi modern perlu dibina dan diarahkan untuk kepentingan nasional, dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pengembangan bahasa nasional.

Berkenaan dengan itu, seluruh permasalahan bahasa di Indonesia sebagai masalah nasional yang merupakan satu jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, (3) masalah pengajaran bahasa asing perlu diolah dan digarap secara teliti, berencana, berkesinambungan, serta terarah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam jangka pendek dan jangka menengah, serta menuju terwujudnya tujuan nasional dalam jangka panjang, sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Masalah kebahasaan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Bahasa Indonesia dalam berbagai fungsinya: sebagai bahasa negara, sarana komunikasi ilmu dan teknologi, sarana pendidikan, dan sarana pengembang kebudayaan, wajib ditingkatkan pengembangan dan pembinaannya secara terpadu dan terencana. Dengan demikian, masyarakat bahasa Indonesia akan memiliki alat komunikasi yang canggih, yang mempunyai bentuk estetis, luwes, dan beragam, sesuai dengan keperluan

pemakaiannya. Langkah yang perlu dilanjutkan ialah pemantapan ejaan yang sudah dibakukan, pemasyarakatan tata bahasa yang baku, pengembangan kamus dan berbagai laras bahasa Indonesia, berdasarkan perencanaan bahasa yang cermat dan teliti.

- b. Kemampuan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam situasi yang memerlukannya serta jumlah pemakainya masih perlu ditingkatkan agar tercapai keterampilan berbahasa yang tinggi dan sikap positif yang mengandung unsur kebanggaan bahasa, kesetiaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. Sasaran itu harus diusahakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal.
- c. Bahasa daerah Nusantara yang dipelihara masyarakat perlu tetap dibina karena bahasa itu juga berperan sebagai wadah kebudayaan daerah dan sebagai unsur budaya nasional. Untuk mencapai maksud itu, penelitian bahasa daerah perlu digalakkan dengan sasaran penyusunan gramatikal deskriptif bahasa daerah yang penting dan kamus dwibahasa bahasa daerah.
- d. Susastra Indonesia dan susastra daerah sebagai hasil reka cipta dunia seni Indonesia perlu dibina dan dikembangkan agar dapat diminati dan dinikmati oleh kalangan masyarakat Indonesia secara lebih luas.
- e. Jumlah dan mutu profesional tenaga kebahasaan dan kesusastraan perlu ditingkatkan jika dikaitkan dengan peluasan tugas pembinaan dan pengembangan bahasa.
- f. Mengingat sangat luasnya ruang lingkup pembinaan dan pengembangan bahasa, maka diperlukan suatu lembaga yang memiliki kedudukan dan struktur organisasi yang memadai.
- g. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dapat tercapai dengan baik jika ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

1.3 Arah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra

1.3.1 Arah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Garis haluan kebahasaan adalah hal-hal berkenaan dengan penentuan kedudukan bahasa (nasional, daerah, asing) dan fungsinya (keresmian, perhubungan luas, tujuan khusus, kependidikan, dan kebudayaan). Kebijakan yang menyangkut bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan, ditekankan agar bahasa Indonesia, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara dan bahasa

nasional, tumbuh menjadi bahasa modern yang dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi nasional, unsur sarana pengembangan kebudayaan nasional, sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan sarana untuk mewariskan tata nilai nasional kepada generasi penerus.

Kebijakan yang menyangkut bahasa daerah, baik lisan maupun tulisan, diarahkan agar bahasa daerah, sebagai unsur kebudayaan yang hidup dan mempunyai peranan tersendiri dalam masyarakat etnik, tumbuh serasi dengan bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi sumber utama pemekaran kosakata bahasa Indonesia dan, sebaliknya, bahasa Indonesia menjadi sumber pemekaran kosakata bahasa daerah serta dapat memenuhi berbagai fungsi kemasyarakatan yang diberikan kepada bahasa daerah itu dengan memperhatikan kenyataan bahwa bahasa daerah di Indonesia beratus-ratus jumlahnya, taraf perkembangan yang dicapai dan fungsi kemasyarakatan yang dimiliki tidak sama, dan kelompok etnis pendukungnya berbeda-beda pula jumlahnya.

Kebijakan yang menyangkut bahasa asing diarahkan agar pembinaan bahasa asing, sebagai sarana memasuki dunia pergaulan antarbangsa di bidang ilmu, teknologi, agama, kebudayaan, ekonomi, dan politik; berkembang tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan bahasa Indonesia.

1.3.2 Arah Pembinaan dan Pengembangan Sastra

Garis haluan pembinaan dan pengembangan sastra adalah hal-hal berkenaan dengan jaringan masalah yang muncul dari "insan sastra" (sastrawan, penikmat sastra) dan karya sastra (Indonesia, daerah, dan [pengaruh] sastra asing).

Upaya pembinaan sastra bertujuan menciptakan masyarakat yang apresiasi dengan jalan melakukan penyuluhan, peningkatan mutu sastrawan dan karya sastra, penilaian karya sastra, sayembara, dan pemberian hadiah sastra. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai jaringan, antara lain, sastrawan dan kritikus sastra serta menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga atau badan yang relevan.

Pengembangan sastra dilaksanakan dengan melakukan penelitian terhadap karya sastra dan penyebarluasan hasil penelitian itu untuk konsumsi para sastrawan, penikmat sastra, dan kritikus sastra (Indonesia dan daerah). Dengan cara itu, para penikmat dapat mengetahui arti pentingnya karya sastra dan para sastrawan dapat lebih meningkatkan wawasan. Pada gilirannya, hasil penelitian itu, dapat digunakan sebagai bahan penulisan buku teori sastra Indonesia. Di samping itu, perlu pula dilakukan penerjemahan buku-

buku teori sastra asing yang relevan dalam menunjang teori sastra Indonesia. Hal penting pula yang perlu dilakukan adalah pentransliterasian teks-teks sastra klasik yang tertulis serta perekaman, pentranskripsian, dan penerjemahan sastra lisan yang terdapat di berbagai daerah untuk kemudian diterbitkan dan disebarluaskan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI



2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/0 Tahun 1975, yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222g/O/1980, kedudukan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditetapkan sebagai pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan bahasa yang berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijaksanaan Menteri dan kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bahasa;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan bahasa, serta membina unit pelaksana teknis penelitian bahasa di daerah; dan
- c. melaksanakan urusan tata usaha Pusat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0218/O/1990, tanggal 3 April 1990, telah ditetapkan Perincian Tugas Bagian, Subbagian, dan Bidang di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

2.2 *Susunan Organisasi*

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah;
- c. Bidang Sastra Indonesia dan Daerah;
- d. Bidang Perkamusan dan Peristilahan; dan
- e. Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi di lingkungan Pusat. Untuk menyelenggarakan tugas itu, *Bagian Tata Usaha* mempunyai fungsi:

- a. melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. melakukan urusan kepegawaian; dan
- c. melakukan urusan keuangan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas (1) Subbagian Urusan Dalam, (2) Subbagian Kepegawaian, dan (3) Subbagian Keuangan.

Perincian tugas *Bagian Tata Usaha* adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun program kerja tahunan *Bagian* dan mempersiapkan penyusunan program kerja tahunan Pusat;
- 2) mempersiapkan rancangan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan bahasa;
- 3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data;
- 4) melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan di lingkungan Pusat;
- 5) melaksanakan urusan penyelenggaraan rapat dinas;
- 6) melaksanakan urusan perlengkapan;
- 7) melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
- 8) melaksanakan urusan kepegawaian;
- 9) melaksanakan urusan keuangan;
- 10) melaksanakan urusan pengembangan ketatausahaan;
- 11) melaksanakan pemantauan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- 12) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- 13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja *Bagian* dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Pusat.

Subbagian Urusan Dalam

Perincian tugas Subbagian Urusan Dalam adalah :

- 1) menyusun program kerja tahunan Subbagian dan mempersiapkan penyusunan program kerja tahunan Bagian serta mempersiapkan bahan penyusunan program kerja tahunan Pusat;
- 2) melakukan urusan surat-menyurat;
- 3) melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi;
- 4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
- 5) melakukan urusan barang perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, dan usul penghapusan;
- 6) melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kantor;
- 7) melakukan urusan keprotokolan, penerimaan tamu, dan upacara;
- 8) melakukan urusan kerumahtanggaan dan perawatan kantor;
- 9) mengatur penggunaan, perawatan, dan perbaikan kendaraan dinas;
- 10) melakukan urusan penyusunan risalah rapat dinas Pusat;
- 11) melakukan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- 12) menyusun laporan pelaksanaan program kerja Subbagian dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bagian serta mempersiapkan bahan penyusunan laporan Pusat.

Subbagian Kepegawaian

Perincian tugas Subbagian Urusan Kepegawaian adalah:

- 1) menyusun program kerja tahunan Subbagian;
- 2) menyusun formasi pegawai;
- 3) mempersiapkan pengusulan mutasi pegawai;
- 4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
- 5) mempersiapkan usaha pengembangan pegawai;
- 6) mempersiapkan ujian dinas pegawai golongan I, II, dan III di lingkungan Pusat;
- 7) mempersiapkan usaha peningkatan disiplin pegawai;
- 8) melakukan urusan registrasi kepegawaian;
- 9) melakukan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai;
- 10) mengurus cuti pegawai;
- 11) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan kepegawaian;

- 12) melakukan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- 13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja Subbagian.

Subbagian Keuangan

Perincian tugas Subbagian Keuangan adalah:

- 1) menyusun program kerja tahunan Subbagian;
- 2) menyusun usul rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- 3) menyusun rencana penggunaan anggaran;
- 4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
- 5) mempersiapkan usul permintaan UUDP dan mengurus penyelesaiannya;
- 6) melakukan tata usaha pengurusan keuangan;
- 7) mempersiapkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan;
- 8) melakukan tata usaha perjalanan dinas;
- 9) melakukan pengurusan gaji, uang lembur, dan honorarium pegawai;
- 10) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan keuangan;
- 11) melakukan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- 12) menyusun laporan pelaksanaan program kerja Subbagian.

Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah

Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah serta pengajaran bahasa. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah mempunyai fungsi:

- a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa; serta
- b. mempersiapkan pembakuan bahasa Indonesia dan daerah.

Perincian Tugas Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah adalah:

- 1) menyusun program kerja tahunan Bidang;
- 2) menyusun rencana kegiatan mengenai pembinaan, pengkajian, dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah;
- 3) meneliti berbagai aspek bahasa di Indonesia untuk pembakuan;
- 4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
- 5) menyusun bahan pemyarakatan bahasa Indonesia baku;
- 6) memantapkan sarana pengembangan bahasa Indonesia;
- 7) memantapkan sarana pengembangan bahasa daerah;

- 8) memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia;
- 9) memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan bahasa daerah;

Bidang Sastra Indonesia dan Daerah

Bidang Sastra Indonesia dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan sastra Indonesia dan daerah serta pengajaran sastra. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Sastra Indonesia dan Daerah mempunyai fungsi:

- a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, penelitian, dan pengembangan sastra; serta
- b. melakukan pembinaan, penelitian, dan pengembangan sastra.

Perincian tugas Bidang Sastra Indonesia dan Daerah adalah:

- 1) menyusun program kerja tahunan Bidang;
- 2) menelaah sastra lama;
- 3) menyusun karya tulis lama;
- 4) mengumpulkan dan mengolah data;
- 5) menelaah sastra modern;
- 6) menyusun karya tulis sastra modern;
- 7) menilai karya sastra;
- 8) menerjemahkan karya sastra;
- 9) menyediakan sarana pembinaan tenaga kesusastraan;
- 10) menyediakan informasi kesusastraan;
- 11) menyediakan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan sastra Indonesia dan daerah;
- 12) melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- 13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang.

Bidang Perkamusan dan Peristilahan

Bidang Perkamusan dan Peristilahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan kosakata dan istilah untuk kepentingan penyusunan kamus. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Perkamusan dan Peristilahan mempunyai fungsi:

- a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis perkamusan dan peristilahan; serta

- b. melakukan pembinaan, penelitian, dan pengembangan perkamusan dan peristilahan, antara lain untuk penyusunan kamus dan ensiklopedi.

Perincian tugas Bidang Perkamusan dan Peristilahan adalah:

- 1) menyusun program kerja tahunan Bidang;
- 2) meneliti dan mengkodifikasi khasanah kebahasaan dalam usaha menyusun kamus ekabahasa, baik untuk keperluan kamus umum maupun kamus khusus, kamus dwibahasa, ensiklopedi, dan tesaurus;
- 3) menyediakan layanan dan informasi bagi masyarakat dalam bidang leksikografi;
- 4) mengumpulkan dan mengolah data;
- 5) menyediakan sarana pengembangan kosakata (termasuk istilah) bahasa Indonesia dan bahasa daerah;
- 6) menyediakan sarana pengembangan peristilahan yang mencakup berbagai bidang ilmu;
- 7) mengelola dan melaksanakan kerja sama kebahasaan dalam peristilahan dalam usaha penyelarasan dan pembakuan;
- 8) memantau dan mengevaluasi pengembangan kosakata (termasuk istilah) bahasa Indonesia dan bahasa daerah;
- 9) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan perkamusan dan peristilahan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- 11) menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang

Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah

Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, daerah, dan asing, serta pengadaan perpustakaan sebagai sarana pengembangan kebahasaan. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah mempunyai fungsi:

- a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis dan bahan informasi pengembangan bahasa dan sastra;
- b. melakukan pengembangan bahasa dan sastra;
- c. memilih karya sastra untuk diterjemahkan; dan
- d. menerbitkan hasil penelitian.

Perincian Tugas Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah adalah :

- 1) menyusun program kerja Bidang;
- 2) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
- 3) mengembangkan bahan penyuluhan bahasa dan sastra;
- 4) mengumpulkan dan mengolah data;
- 5) membina hubungan kerja sama kebahasaan dan kesusastraan dengan instansi lain, organisasi profesi, dan jaringan komunikasi informasi kebahasaan dan kesusastraan di dalam dan di luar negeri;
- 6) mengurus dan membina perpustakaan sebagai pusat pemberian informasi kebahasaan dan kesusastraan;
- 7) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan bahasa dan sastra;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- 9) menyusun laporan pelaksanaan program kerja bidang.

2.3 Unit Pelaksana Teknis

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai tiga buah unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, yaitu

- a. Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta,
- b. Balai Penelitian Bahasa di Denpasar,
- c. Balai Penelitian Bahasa di Ujungpandang.

Balai Penelitian Bahasa itu mempunyai tugas melaksanakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di daerahnya masing-masing. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Balai Penelitian Bahasa mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penelitian bahasa, terutama bahasa-bahasa daerah di daerahnya masing-masing;
- b. melaksanakan penelitian sastra, terutama sastra daerah di daerahnya masing-masing; dan
- c. melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Balai.

Balai Penelitian Bahasa terdiri dari (1) Kepala Balai, (2) Subbagian Tata Usaha, (3) Tenaga Peneliti, serta (4) Perpustakaan dan Dokumentasi.

2.4 Struktur Organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa



BAB III

KEBIJAKSANAAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

3.1 Dasar Kebijakan

Dasar yang dipakai sebagai landasan kerja dalam pembinaan dan pengembangan bahasa adalah sebagai berikut.

- a. Pancasila
- b. UUD 1945 (Bab XV, Pasal 36)
- c. GBHN 1988
- d. Repelita V, dan
- e. Keputusan dan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan masalah kebahasaan dan kesastraan.

3.2 Organisasi

Untuk mencapai keberhasilan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra, organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Balai Penelitian Bahasa perlu dikembangkan dan disempurnakan. Dalam kaitan itu, langkah-langkah kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan peran para pejabat Pusat Bahasa;
- 2) meningkatkan hubungan kerja antar-unit di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; dan
- 3) menambah jumlah Balai Penelitian Bahasa dari 3 buah menjadi 8 buah.

3.3 Ketenagaan

Secara bertahap jumlah dan mutu tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah dapat ditingkatkan. Akan tetapi, cakupan tugas pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra semakin bertambah luas karena meningkatnya perhatian masyarakat terhadap masalah kebahasaan dan kesas-

traan. Oleh karena itu, masalah ketenagaan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih baik. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan jumlah karyawan, terutama tenaga teknis, Pusat Bahasa dan Balai Bahasa secara bertahap dan berencana;
- 2) meningkatkan mutu dan kemampuan karyawan Pusat Bahasa melalui pendidikan, penataran, seminar, dan ceramah;
- 3) melanjutkan usaha peningkatan status kepegawaian tenaga teknis menjadi tenaga peneliti; dan
- 4) meningkatkan disiplin dan prestasi kerja seluruh karyawan.

3.4 Pembinaan Bahasa dan Sastra

3.4.1 Pembinaan Bahasa

Kegiatan pembinaan bahasa seperti (1) penyuluhan langsung kepada instansi pemerintah dan swasta dan (b) penyuluhan tak langsung melalui surat, telepon, surat kabar/majalah, seri penyuluhan, serta radio dan televisi perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu diambil langkah kebijaksanaan seperti berikut:

- 1) menyiapkan bahan penyuluhan untuk berbagai kelompok masyarakat pemakai bahasa;
- 2) memupuk sikap luwes dalam melaksanakan penyuluhan;
- 3) meningkatkan pengelolaan penyuluhan melalui surat, telepon, dan media massa secara efisien dan efektif;
- 4) meningkatkan pengelolaan siaran bahasa melalui radio dan televisi secara lebih profesional; dan
- 5) meningkatkan usaha penerbitan seri penyuluhan dan buku acuan (monografi, bunga rampai, majalah, lembar komunikasi).

3.4.2 Pembinaan Sastra

Pembinaan sastra diarahkan kepada upaya peningkatan mutu dan jumlah penikmat sastra, sastrawan, dan karya sastra. Untuk itu, kebijaksanaan yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan pembinaan sikap dan kemampuan penikmat dalam mengapresiasi karya sastra;
- 2) meningkatkan kemampuan para peneliti dan kritikus sastra; dan
- 3) meningkatkan pembinaan daya cipta para sastrawan.

3.5 Pengembangan Bahasa dan Sastra

3.5.1 Pembakuan

Usaha pembakuan bahasa Indonesia perlu ditingkatkan baik dalam hal penyempurnaan sistem sandi dan kaidah bahasa maupun dalam hal penyebaran hasil pembakuan bahasa itu. Dalam hubungan dengan pembakuan itu, perlu ditetapkan beberapa langkah kebijakan seperti berikut:

- 1) melaksanakan penyempurnaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*;
- 2) melaksanakan penulisan tata bahasa;
- 3) melaksanakan penyusunan kamus bahasa Indonesia untuk pelajar, kamus istilah, kamus Indonesia-daerah, dan kamus sastra;
- 4) mengusahakan penulisan/penerjemahan berbagai buku pedoman dan pengantar kebahasaan dan kesastraan; dan
- 5) meningkatkan usaha penyebaran hasil-hasil pembakuan.

3.5.2 Penelitian

Penelitian berbagai aspek bahasa dan sastra Indonesia perlu ditingkatkan dalam rangka mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia yang memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan masyarakat Indonesia modern dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Usaha penelitian bahasa dan sastra daerah perlu pula ditingkatkan karena di satu pihak bahasa dan sastra daerah merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan, dan di pihak lain bahasa dan sastra daerah dapat menjadi sumber untuk pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Dalam hubungan itu, perlu diambil beberapa langkah kebijaksanaan sebagai berikut:

- 1) meningkatkan usaha penelitian berbagai aspek bahasa Indonesia untuk keperluan pembakuannya;
- 2) meningkatkan usaha penelitian karya-karya sastra Indonesia;
- 3) meningkatkan usaha inventarisasi bahasa daerah dengan mengutamakan bahasa-bahasa daerah yang terancam punah;
- 4) meningkatkan usaha penyusunan tata bahasa dan kamus bahasa daerah.

3.6 Kerja Sama Kebahasaan

Kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan instansi pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri diperlukan

dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kerja sama yang telah ada dengan instansi pemerintah dan swasta;
- 2) mengusahakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta yang relevan dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa.

3.7 *Prasarana dan Sarana*

Prasarana dan sarana yang secara langsung atau tidak langsung menunjang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra perlu ditingkatkan pemanfaatannya. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

- 1) meningkatkan efisiensi pemanfaatan dana;
- 2) mengusahakan pengadaan dan pemanfaatan gedung, perlengkapan, dan alat mobilitas dengan sebaik-baiknya; dan
- 3) mengusahakan pembinaan dan pengembangan serta pemanfaatan perpustakaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

4.1 Organisasi

Berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Oktober 1984 no. 14/U/1984, yang menyatakan bahwa Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dapat mengusulkan penyempurnaan struktur organisasi yang lebih memadai, langkah awal dalam hubungan itu adalah pembentukan sejumlah satuan kerja yang disesuaikan dengan ruang lingkup kerja serta tenaga yang ada di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pada saat ini jumlah satuan kerja yang ada adalah sebagai berikut.

1. Satuan Kerja Bahasa Indonesia
2. Satuan Kerja Bahasa Daerah
3. Satuan Kerja Bina Sastra
4. Satuan Kerja Sastra Lama
5. Satuan Kerja Sastra Modern
6. Satuan Kerja Perkamusan
7. Satuan Kerja Peristilahan
8. Satuan Kerja Penyuluhan
9. Satuan Kerja Pembimbingan
10. Satuan Kerja Perpustakaan dan Dokumentasi

Setiap satuan kerja itu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala bidangnya masing-masing.

Nama *Balai Penelitian Bahasa* diusulkan agar diubah menjadi *Balai Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* sehingga pembinaan dan pengembangan bahasa di daerah berada di bawah koordinasi Balai Bahasa. Mulai tahun 1989/1990, ditetapkan wilayah kerja Balai Bahasa agar seluruh kegiatan penelitian

kebahasaan dan kesastraan dapat terkoordinasi dengan lebih baik dan berencana. Wilayah kerja itu adalah sebagai berikut.

No.	Balai Bahasa	Wilayah Kerja
1.	Yogyakarta	1. D.I. Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur
2.	Denpasar	1. Bali 2. Nusa Tenggara Barat
3.	Ujungpandang	1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Tengah 3. Sulawesi Utara 4. Sulawesi Tenggara
4.	Padang (dalam proses pendirian)	1. D.I. Aceh 2. Sumatra Utara 3. Sumatra Selatan 4. Sumatra Barat 5. Bengkulu 6. Riau 7. Lampung
5.	Bandung (dalam proses pendirian)	1. Jawa Barat
6.	Banjarmasin (dalam proses pendirian)	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Barat 4. Kalimantan Timur
7.	Kupang (dalam proses pendirian)	1. Nusa Tenggara Timur 2. Timor Timur
8.	Irian Jaya (dalam proses pendirian)	1. Irian Jaya 2. Maluku

4.2 Ketenagaan

Salah satu faktor penunjang kelancaran dan keberhasilan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah adalah tersedianya tenaga ahli yang profesional. Dalam kaitan itu, kebijakan yang dilakukan dalam bidang ketenagaan selama ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kebahasaan.

4.2.1 Peningkatan Kuantitas

Dalam upaya meningkatkan kuantitas tenaga kebahasaan dan kesastraan baik di pusat maupun di daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa--melalui pengisian formasi pegawai yang tersedia--melaksanakan peningkatan dan penempatan pegawai baru yang setiap tahun rata-rata 20 orang.

Perkembangan kuantitas tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Unit Kerja	Tahun														
		1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
1.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	62	72	84	104	122	135	146	154	156	159	168	177	192	206	231
2.	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta	12	15	16	16	16	28	32	35	37	37	38	41	42	44	51
3.	Balai Penelitian	10	11	12	12	15	19	20	23	24	27	27	29	35	22	31
4.	Balai Penelitian Bahasa Ujungpandang	12	12	13	13	14	17	19	21	23	26	25	31	32	35	37

4.2.2 Peningkatan Kualitas

Dalam upaya penyediaan tenaga yang profesional, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa — dengan dukungan dana pembangunan dana ILDEP — telah melaksanakan usaha peningkatan kualitas tenaga kebahasaan dan kesastraan melalui penataran, pendidikan, dan partisipasi dalam pertemuan kebahasaan.

Dengan dana pembangunan, sejak tahun 1976 hingga tahun 1985, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah memberikan beasiswa kepada 1.473 mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dari 31 universitas dan IKIP negeri di seluruh Indonesia.

4.2.2.1 Penataran

Penataran kebahasaan dan kesastraan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1989 adalah sebagai berikut.

a. Penataran Kebahasaan dan Kesastraan (ILDEP I)

No.	Jenis Penataran	Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V		Keterangan
		Tahun	Peserta	Tahun	Peserta	Tahun	Peserta	Tahun	Peserta	Tahun	Peserta	
1.	Leksikografi	1974	30	1975	20	1975	15	1976	15	1977	5	16 orang telah menyelesaikan program doktor
2.	Sosiolinguistik	1975	30	1976	20	1976	15	1977	15	1978	5	
3.	Dialektologi	1976	30	1977	20	1977	15	1978	15	1979	5	
4.	Penerjemahan	1977	30	1978	20	1978	15	1979	15	1980	5	
5.	Sastra	1978	30	1979	20	1979	15	1980	15	1981	5	
6.	Morfologi-Sintaksis	1979	30	1980	20	1981	15	1981	15	1982	5	
7.	Linguistik Historis Komparatif	1980	30	1981	20	1981	15	1982	15	1983	5	

b. Penataran Kebahasaan

No.	Jenis Penataran	Tahap I		Tahap II		Tahap III	
		Tahun	Peserta	Tahun	Peserta	Tahun	Peserta
1.	Linguistik Umum I	1981	30	1982	30	1982	15
2.	Linguistik Umum II	1982	30	1983	30	1983	17
3.	Sastra Angkatan I	1983	30	1984	30	1984	17
4.	Linguistik Umum Angkatan III (Leksikografi)	1984	30	1985	30	1985	30
5.	Sastra Angkatan II	1985	30	1986	30	—	—
6.	Penyuntingan: Angkatan I dan II Angkatan III dan IV	1982	30	1983	40	—	—
		1984	40	1985	30	—	—
7.	Penyuluhan : Angkatan I, II, dan III	1987	30	1988	30	1989	30

4.2.2.2 Pendidikan

Pendidikan lanjutan yang dilaksanakan melalui program ILDEP II pada tahun 1988-1989 adalah sebagai berikut.

Program S-2		Program S-3	
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	= 5 orang	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	= 5 orang
Balai Penelitian Bahasa	= 5 orang	Balai Penelitian Bahasa	= 2 orang
Perguruan Tinggi	= 3 orang	Perguruan Tinggi	= 15 orang

4.2.2.3 Partisipasi dalam Pertemuan Kebahasaan

Di samping pendidikan dan pelatihan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa juga memberikan kesempatan kepada karyawannya turut serta dalam berbagai pertemuan kebahasaan dan kesastraan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Melalui kegiatan ini diharapkan para karyawan dapat memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan dan keahliannya dalam rangka peningkatan kualitas tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada umumnya.

4.3 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sejak berdirinya hingga sekarang telah melaksanakan berbagai kegiatan — sesuai dengan tugas pokoknya—, yaitu membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Berbagai kegiatan itu dilaksanakan melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- penelitian bahasa dalam berbagai aspeknya;
- penelitian sastra Indonesia lama dan modern;
- penelitian sastra daerah lama dan modern;
- evaluasi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah;
- kodifikasi khazanah kebahasaan dalam usaha penyusunan kamus eka-bahasa, baik yang umum maupun yang khusus, kamus dwibahasa, ensiklopedi, dan tesaurus;
- penyusunan bahan pemasyarakatan bahasa baku;
- penyusunan karya tulis sastra lama, sastra modern, dan penerjemahan karya sastra;
- pemantapan sarana pengembangan bahasa Indonesia dan daerah;
- penyediaan sarana pengembangan kosakata (termasuk istilah) bahasa Indonesia dan daerah;

- j. pelayanan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam leksikografi;
- k. penyuluhan dan pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
- l. pengembangan bahan penyuluhan bahasa dan sastra serta bahan pustaka informasi kebahasaan dan kesastraan;
- m. penilaian karya sastra; dan
- n. kerja sama kebahasaan dan kesastraan;

Upaya merealisasikan berbagai kegiatan di atas dilakukan melalui penyuluhan, penelitian, pertemuan, kerja sama, dan penerbitan.

4.3.1 Penyuluhan

4.3.1.1 Penyuluhan melalui TVRI dan RRI

Kegiatan penyuluhan melalui televisi dan radio merupakan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang berdampak luas, yaitu mencakup seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu disiarkan setiap seminggu sekali melalui TVRI dan RRI Stasiun Pusat Jakarta.

Siaran pembinaan bahasa Indonesia melalui TVRI dan RRI ini diarahkan oleh suatu tim yang beranggotakan para pakar bahasa dan sastra dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan dari berbagai perguruan tinggi. Penanggung jawab tim dan materi siaran itu adalah Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Melalui acara pembinaan bahasa Indonesia di TVRI dan RRI, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memberikan tanggapan, saran, atau mengajukan pertanyaan yang bertalian dengan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia.

4.3.1.2 Penyuluhan melalui Surat dan Telepon

Kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di samping diselenggarakan melalui TVRI dan RRI, diselenggarakan juga melalui surat dan telepon. Setiap tahun diterima rata-rata 627 surat masuk mengenai masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia.

Sejak tahun 1987, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mencantumkan nomor teleponnya pada halaman nomor telepon penting buku *Petunjuk Telepon* yang diterbitkan oleh Perum Telekomunikasi. Sehubungan dengan itu, masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal kebahasaan dan kesastraan dapat menghubungi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melalui telepon.

4.3.1.3. *Penyuluhan Bersemuka*

Di samping melaksanakan penyuluhan melalui TVRI dan RRI serta melalui surat dan telepon, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyelenggarakan penyuluhan kepada tamu atau pengunjung, baik perseorangan maupun rombongan, dan memberikan penyuluhan di lembaga/instansi pemerintah dan swasta. Pada tahun 1983/1984 pernah dilakukan penyuluhan dengan mengunjungi tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta.

4.3.2 *Penyusunan*

Hasil penyusunan buku pedoman, pengantar, dan kamus setiap tahun rata-rata ± 15 naskah. Sejak tahun 1975 hingga tahun 1989 tercatat sebanyak ± 200 buku yang telah diterbitkan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Hasil penyusunan naskah yang sangat penting yang telah diterbitkan pada tahun 1988 adalah *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*.

4.3.3 *Penelitian*

Penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dengan berbagai aspeknya yang setiap tahun rata-rata ± 30 judul menjadi bahan rujukan dan bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa di masa mendatang.

Sejak tahun 1975 hingga tahun 1989 tercatat sebanyak 1.106 naskah laporan hasil penelitian. Secara kuantitatif rincian hasil penelitian itu dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.3.4 *Pertemuan Kebahasaan*

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada para pakar bahasa dan sastra serta para pakar bidang lain, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyelenggarakan pertemuan kebahasaan, baik bersifat nasional maupun internasional. Pertemuan kebahasaan itu dilaksanakan, antara lain, dalam rangka kongres, bulan bahasa, dan seminar.

4.3.4.1 *Kongres Bahasa*

Dalam upaya merumuskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra, terutama bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, telah dilaksanakan serangkaian kongres yang membahas berbagai masalah kebahasaan dan kesastraan. Kongres bahasa Indonesia yang pernah dilaksanakan di Indonesia selama ini adalah sebagai berikut.

a. *Kongres Bahasa Indonesia I*

Pada tanggal 25--28 Juni 1938, di Solo, telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I, yang bertujuan mencari suatu pedoman bagi para pemakai bahasa, mengatur bahasa, dan mengusahakan agar bahasa Indonesia dapat tersebar lebih luas karena pada waktu itu diperoleh gambaran umum bahwa bahasa Indonesia dianggap belum teratur.

Pencetus atau gagasan diadakan Kongres Bahasa Indonesia I itu bukan dari pihak pemerintah, melainkan dari seorang wartawan harian *Soeara Oemoem*, Surabaya, yaitu Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo.

Para pembicara dan topik yang dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia I adalah sebagai berikut.

- (1) Sanusi Pane (Sejarah Bahasa Indonesia)
- (2) Ki Hadjardewantara (Bahasa Indonesia dalam Pergoeroean)
- (3) H.B. Perdi (Bahasa Indonesia di dalam Persoeratkabaran)
- (4) Mr. Amir Sjarifuddin (Menjesoeaikan Kata dan Faham Asing kepada Bahasa Indonesia)
- (5) Mr. Muh. Yamin (Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatoean dan Bahasa Keboedajaan Indonesia)
- (6) Soekardjo Wirjopranoto (Bahasa Indonesia dalam Badan Perwakilan)
- (7) St. Takdir Alisjahbana (Pembaharoean Bahasa dan Oesaha Mengatoernja)
- (8) K. St. Pamoentjak (Tentang Edjaan Bahasa Indonesia)
- (9) Sanoesi Pane (Tentang Instituut Bahasa Indonesia)
- (10) M. Tabrani (Mentjepatkan Penjebaran Bahasa Indonesia)

Peserta kongres tercatat sebanyak \pm 500 orang. Poetoesan Kongres Bahasa Indonesia I dapat dilihat pada Lampiran 5.

b. *Kongres Bahasa Indonesia II*

Sebagai tindak lanjut hasil yang diputuskan dalam Kongres Bahasa Indonesia I, maka pada tanggal 28 Oktober--2 November 1954, di Medan diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II. Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia II ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan pemrakarsa serta penyelenggaranya adalah pemerintah, yaitu Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan.

Kongres Bahasa Indonesia II diresmikan pembukaannya oleh Presiden Soekarno, di Gedung Kesenian, Medan, pukul 08.00 pagi. Peserta kongres tercatat sebanyak 302 orang yang datang dari berbagai daerah Indonesia, juga dari tanah Semenanjung, dari Negeri Belanda, dari Prancis, dan dari India.

Kongres dibagi atas beberapa seksi sebagai berikut.

- | | | |
|-----------|---|---|
| Seksi A : | (1) Tata Bahasa Indonesia | (Prof. Dr. Prijana) |
| | (2) Dasar-dasar Ejaan Bahasa Indonesia dengan huruf Latin | (Prof. Dr. Prijana) |
| Seksi B : | (1) Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dan administrasi. | (Mr. A.G. Pringgodigdo) |
| | (2) Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dan administrasi. | (Mr. Koentjoro Poerbopranoto) |
| Seksi C : | (1) Bahasa Indonesia dalam kuliah dan pengetahuan | (Prof. Dr. Prijohutomo) |
| | (2) Kamus Etimologis Indonesia. | (Prof. Dr. Prijohutomo) |
| Seksi D : | (1) Bahasa Indonesia di dalam Film | (Inu Perbantarasi (alm.) diwakili H.B. Angin) |
| | (2) Bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari | (Madong Lubis) |
| | (3) Bahasa Indonesia dalam prosa dan puisi | (Bahrum Rangkuti) |
| Seksi E : | (1) Fungsi Bahasa Indonesia dalam pers | (T. Sjahril) |
| | (2) Bahasa Indonesia dalam pers. | (Adinegoro) |
| | (3) Bahasa Indonesia dalam penyiaran radio. | (Kamarsjah) |

Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan itu dapat dilihat pada Lampiran 5.

c. *Kongres Bahasa Indonesia III*

Dalam rangka memperingati 50 tahun Hari Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober-3 November 1978, di Jakarta, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III. Tujuan kongres itu adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional, sesuai dengan isi dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928, maupun sebagai bahasa negara, sesuai dengan Bab V, Pasal 36, UUD 1945.

Kongres membahas masalah kebahasaan yang meliputi (1) fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia dan sebagai sarana perhubungan antardaerah dan antarbudaya di Indonesia; (2) fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemerintahan dan ketahanan nasional, sebagai unsur dan sarana pendukung pengembangan kebudayaan nasional, sebagai sarana pendidikan dan pengajaran, sebagai sarana pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai sarana komunikasi; dan (3) pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, yang terangkum dalam 49 makalah.

Kongres Bahasa Indonesia III diikuti oleh 419 orang peserta, termasuk beberapa orang peserta dari luar negeri. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia III dapat dilihat pada Lampiran 5.

d. Kongres Bahasa Indonesia IV

Lima tahun setelah Kongres Bahasa Indonesia III, pada tanggal 21-26 November 1983, di Jakarta, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV. Kongres bertujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintahan, sarana pengembangan kebudayaan, sarana pendidikan dan pengajaran, termasuk pelaksanaan wajib belajar, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kongres membahas masalah bahasa dan sastra dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan nasional serta kaitannya dengan komunikasi massa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Makalah yang disajikan sebanyak 52 buah oleh para pemakalah yang terdiri atas 6 orang menteri dalam Kabinet Pembangunan III dan para tokoh cendekiawan serta pakar bidang bahasa dan sastra.

Kongres dihadiri oleh 485 orang peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan peserta luar negeri. Keputusan kongres Bahasa Indonesia IV dapat dilihat pada Lampiran 5.

e. Kongres Bahasa Indonesia V

Kongres Bahasa Indonesia V diselenggarakan di Jakarta dalam rangka memperingati 60 tahun Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober-3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia V bertema "Menjunjung Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dalam Konteks Pembangunan Nasional", dengan subtema (a) Peningkatan Mutu dan Peran Bahasa Indonesia Memperlancar Usaha Pencerdasan Bangsa; (b) Bahasa Indonesia Merupakan Sarana Pemantapan Pembangunan Ketahanan Nasional; (c) Kemampuan Berbahasa Indonesia Merupakan Jembatan Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata.

Kongres itu bertujuan memantapkan bahasa Indonesia sehubungan dengan perannya untuk memperlancar usaha pencerdasan bangsa, sebagai jembatan tercapainya kesejahteraan sosial yang adil dan merata.

Kongres diikuti oleh 819 orang peserta yang terdiri atas pakar bahasa dan peminat dari berbagai departemen, lembaga, instansi, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan perseorangan dari dalam dan luar negeri. Kongres itu membahas 73 buah makalah dan 7 makalah di antaranya disajikan oleh Menteri Kabinet Pembangunan IV.

Upacara pembukaan Kongres Bahasa Indonesia V diresmikan oleh Presiden Soeharto, pada tanggal 25 Oktober 1988, pukul 16.30 di Istana Negara, Jakarta.

Selama kongres berlangsung diselenggarakan Pameran Buku atas kerja sama dengan berbagai penerbit dan perseorangan, di Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba 28A, Jakarta.

Keputusan Kongres Bahasa Indonesia V dapat dilihat pada Lampiran 5.

4.3.4.2 Bulan Bahasa dan Sastra

Sejak tahun 1980, setiap bulan Oktober diselenggarakan Bulan Bahasa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda. Bulan Bahasa diisi dengan berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pemyarakatan bahasa dan sastra di Indonesia. Sasaran kegiatannya ditujukan kepada para peminat bahasa dan sastra, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum.

Pada tahun 1989, Bulan Bahasa diubah menjadi Bulan Bahasa dan Sastra dan diisi dengan berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan sebagai berikut.

a. Kegiatan Kebahasaan

- (1) Pertemuan Kebahasaan
- (2) Lomba Kebahasaan
- (3) Penyuluhan
- (4) Penerbitan
- (5) Pintu Terbuka Pusat Bahasa
- (6) Cerdas Cermat

b. Kegiatan Kesastraan

- (1) Diskusi Sastra di Kalangan Siswa SMA
- (2) Cepat Tepat Sastra Tingkat SMA
- (3) Pertemuan Sastrawan dengan Siswa SMA

- (4) Festival Pementasan Sastra
- (5) Pameran Sastra
- (6) Apresiasi Sastra Melalui Radio dan Televisi

Kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra pada waktu yang akan datang direncanakan akan dilaksanakan di seluruh propinsi di Indonesia..

4.3.4.3 *Pertemuan Lain*

Dalam rangka menjangkau informasi dari para pakar bahasa dan sastra dalam kaitannya dengan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa juga menyelenggarakan berbagai pertemuan kebahasaan dan kesastraan baik yang bertaraf nasional maupun internasional.

Pertemuan kebahasaan dan kesastraan itu adalah sebagai berikut.

a. *Bertaraf Nasional*

- 1) Praseminar Politik Bahasa Nasional pada tanggal 29-31 Oktober 1974 di Jakarta;
- 2) Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1975 di Jakarta;
- 3) Seminar Bahasa Daerah pada tahun 1975 di Jakarta;
- 4) Seminar Pengembangan Sastra Indonesia pada tahun 1975 di Jakarta;
- 5) Seminar Pengembangan Sastra Daerah pada tahun 1975 di Jakarta;
- 6) Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah pada tahun 1977 di Jakarta;
- 7) Konferensi Bahasa dan Sastra Indonesia pada tanggal 12-18 Februari 1978 di Jakarta;
- 8) Seminar Pengajaran Bahasa dan Sastra pada tanggal 12-17 April 1982 di Jakarta;
- 9) Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa pada tanggal 30 Mei-4 Juni 1983 di Yogyakarta;
- 10) Simposium Penerjemahan pada tanggal 9-10 Desember 1985 di Jakarta;
- 11) Seminar Tata Bahasa Baku pada tanggal 11-16 Agustus 1986 di Jakarta;
- 12) Simposium Bahasa Keilmuan pada tanggal 15-16 September 1986 di Jakarta.

b. *Bertaraf Internasional*

- 1) Konferensi *Asian Association on National Languages* (ASANAL) III pada tanggal 1–6 Desember 1975 di Jakarta;
- 2) Konferensi Internasional Bahasa-bahasa Austronesia III pada tanggal 19–24 Januari 1981 di Denpasar;
- 3) Konferensi *Asian Association on National Languages* (ASANAL) VI pada tanggal 7–12 September 1981 di Denpasar.

4.3.5 *Kerja Sama Kebahasaan*

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menjalin kerja sama kebahasaan dengan pemerintah Negeri Belanda yang tertuang dalam bentuk *Indonesian Linguistics Development Project* (ILDEP), Malaysia, Brunei Darussalam, Pemerintah DKI Jakarta, dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.

4.3.5.1 *Kerja Sama dengan Negeri Belanda*

Sebagai lanjutan dari ILDEP I (1977–1985), pada tanggal 28 Januari 1988, di Jakarta, ditandatangani piagam kerja sama untuk tahap ILDEP II (1988–1994). Program yang telah dan sedang dikembangkan ialah:

- (1) pendidikan pascasarjana;
- (2) automasi bank data perpustakaan dan perkamusan;
- (3) penataran tenaga profesional dalam rangka pendirian Balai Bahasa;
- (4) pengembangan kepustakaan lewat penerjemahan dan penerbitan.

3.4.5.2 *Kerja Sama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam*

Panitia kerja sama kebahasaan Indonesia–Malaysia, sejak tahun 1972 membentuk Majelis Bahasa yang bernama Majelis Bahasa Indonesia–Malaysia (MBIM). Majelis itu semakin semarak setelah keikutsertaan Brunei Darussalam sehingga mengubah namanya menjadi Majelis Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia (MABBIM). Majelis itu hingga saat ini telah melaksanakan persidangan sebanyak 28 kali. Jumlah istilah yang telah diolah kira-kira 100.000 dalam 50 cabang ilmu. Empat seri kamus ilmu dasar: matematika, fisika, kimia, dan biologi yang akan terdiri atas 43 jilid sedang diterbitkan. Keseluruhan hasil sidang majelis bahasa ini dapat dilihat pada Lampiran 6.

4.3.5.3 *Kerja Sama dengan Pemerintah DKI Jakarta*

Dalam upaya meningkatkan pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan wilayah DKI Jakarta, pada tanggal 18 Februari 1989,

ditandatangani piagam kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Kerja sama itu bertujuan meningkatkan citra dan wajah keindonesiaan di ibukota Jakarta, terutama dalam pemakaian bahasa pada papan nama, papan reklame, badan usaha, dan rambu lalu lintas.

4.3.5.4 Kerja Sama dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Penandatanganan piagam kerja sama dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wan Hankamnas) dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 November 1989.

Kerja sama itu bertujuan meningkatkan pemasyarakatan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pemerintahan secara umum.

4.3.6 Penerbitan

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, di samping menerbitkan hasil penelitian, penyusunan, dan penulisan buku-buku acuan, sejak tahun 1975 telah menerbitkan secara berkala (1) Majalah *Bahasa dan Sastra* dan *Pengajaran Bahasa dan Sastra*, yang terbit sebanyak 12 nomor dalam satu tahun; (2) *Lembar Komunikasi*, yaitu lembar lipatan yang memuat informasi kebahasaan dan kesastraan, dan (3) *Informasi Pustaka Kebahasaan*, yang berisikan informasi pustaka bahasa dan sastra mutakhir yang tersedia pada Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Dalam rangka Kongres Bahasa Indonesia V, pada bulan Oktober 1988 telah disebarluaskan terbitan perdana *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* serta seperangkat kamus istilah ilmu dasar.

4.4 Prasarana dan Sarana

4.4.1 Gedung dan Perlengkapan Kantor

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sejak bulan April 1988 menerima gedung seluas 4.400 meter persegi dari pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gedung itu berada dalam satu lokasi dengan Gedung Pusat Bahasa sehingga secara keseluruhan Pusat Bahasa menempati lokasi seluas 10.265 m² yang terletak di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur. Luas gedung seluruhnya 7.447 m² yang terdiri atas empat buah gedung utama, yaitu (1) Gedung Iswara, (2) Gedung Darma, (3) Gedung Samudera, dan (4) Gedung Cakrawala. Gedung Cakrawala merupakan wisma yang dapat menampung 75 orang.

Dalam rangka pemeliharaan kebersihan, ketenteraman, dan kenyamanan tempat kerja, sejak tahun 1985 secara bertahap dilaksanakan penataan kembali ruang kerja karyawan, ruang sidang/seminar, kafetaria, serta taman dan tempat parkir.

4.4.2 Perpustakaan

Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang menempati ruangan lantai tiga Gedung Iswara dan Gedung Darma memiliki koleksi buku-buku kebahasaan dan kesastraan yang cukup lengkap. Secara keseluruhan klasifikasi koleksi perpustakaan itu sebagai berikut.

**KOLEKSI PERPUSTAKAAN
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
Sampai dengan Desember 1989**

Subjek Jumlah	Umum	Filsafat	Agama	Ilmu Penget. Sosial	Bahasa	Ilmu Murni	Ilmu Terapan	Kesenian	Sastra	Sejarah	Jumlah
Judul 1988	2.116	648	596	3.004	10.289	658	746	811	9.833	1.522	30.223
1989	64	9	17	45	626	27	19	6	347	74	1.234
Jilid 1988	3.618	701	633	5.542	13.222	812	885	1.003	15.362	2.286	44.064
1989	64	9	17	45	697	27	19	6	366	74	1.324

Para pengunjung perpustakaan Pusat Bahasa pada umumnya mahasiswa S-1, S-2, dan S-3, serta para siswa SMTA yang memerlukan sumber acuan kebahasaan dan kesastraan.

4.4.3 Peralatan Teknis

Sejak tahun 1986 secara bertahap, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah melengkapi peralatan teknis berupa komputer pengolah teks bahasa dan sastra serta perlengkapan berupa peralatan elektronik lain.

BAB V

RENCANA DAN PROGRAM KERJA

Di samping rencana dan program kerja tahunan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa juga memiliki program kerja lima tahunan. Rencana dan program kerja lima tahun (1989–1993), sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan dalam Repelita V, dititikberatkan pada usaha-usaha pemyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui berbagai kegiatan yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut.

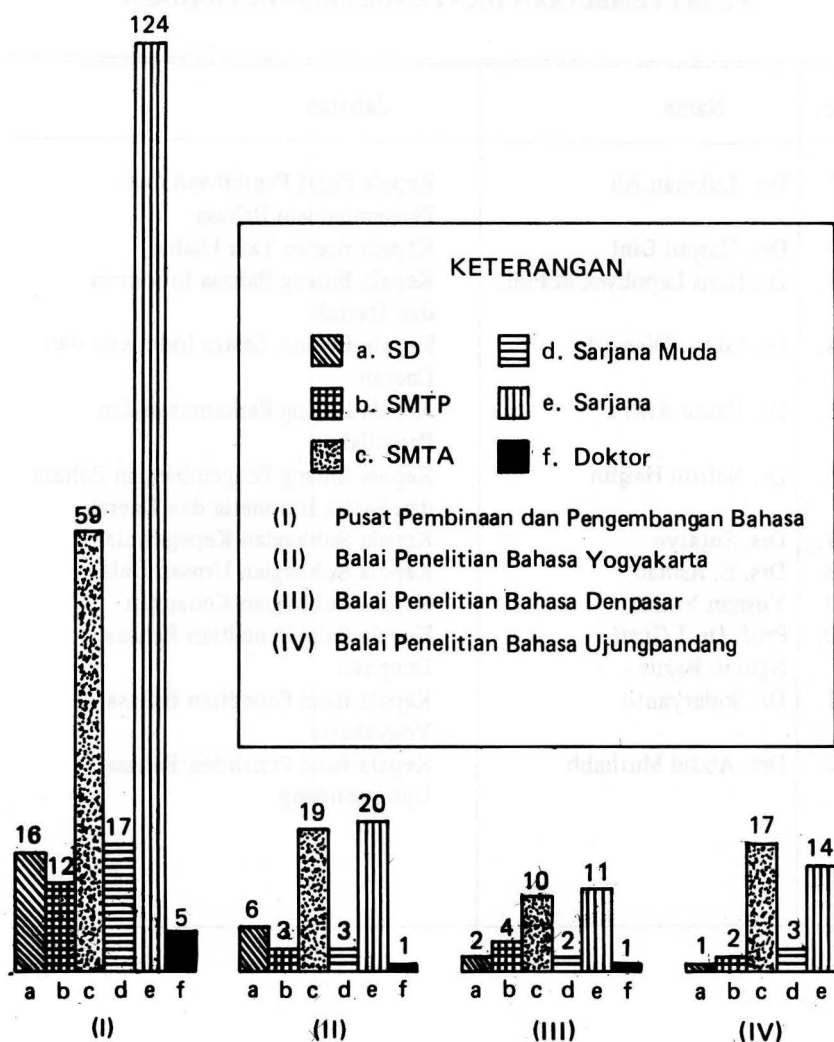
- 1) Pembakuan kebahasaan (penyusunan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Sekolah, Tata Bahasa Daerah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus dwibahasa, kamus istilah ilmu dasar, dan penulisan buku pedoman/pengantar).
- 2) Penyuluhan (penyuluhan bersemuka, melalui media massa, melalui media elektronik, melalui surat, dan melalui telepon).
- 3) Pertemuan kebahasaan dan kesastraan (seminar, diskusi, loka karya, kongres).
- 4) Pemberian penghargaan terhadap karya ilmiah bidang bahasa dan sastra.
- 5) Penyelenggaraan kegiatan apresiasi sastra.
- 6) Penyelenggaraan penataran kebahasaan dan kesastraan.
- 7) Penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah
- 8) Penyusunan Seri Penyuluhan
- 9) Penerbitan dan penyebarluasan hasil penelitian dan penulisan buku-buku bahasa dan sastra
- 10) Pengadaan Balai Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di delapan daerah propinsi (D.I. Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Irian Jaya)
- 11) Pemyarakatan bahasa dan sastra
- 12) Penerbitan buku-buku sastra Indonesia dan daerah
- 13) Penerjemahan

**DAFTAR PEJABAT
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Lukman Ali	Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
2.	Drs. Hasjmi Dini	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil.	Kepala Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah
4.	Dr. Edwar Djamaris	Kepala Bidang Sastra Indonesia dan Daerah
5.	Dr. Hasan Alwi	Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan
6.	Dr. Nafron Hasjim	Kepala Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
7.	Drs. Sutaryo	Kepala Subbagian Kepegawaian
8.	Drs. E. Asmad	Kepala Subbagian Urusan Dalam
9.	Yusnan Yunus	Kepala Subbagian Keuangan
10.	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus	Kepala Balai Penelitian Bahasa Denpasar
11.	Dr. Sudaryanto	Kepala Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta
12.	Drs. Abdul Muthalib	Kepala Balai Penelitian Bahasa Ujungpandang

Lampiran 2:

**KEADAAN PEGAWAI
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
(Berdasarkan Pendidikan)**

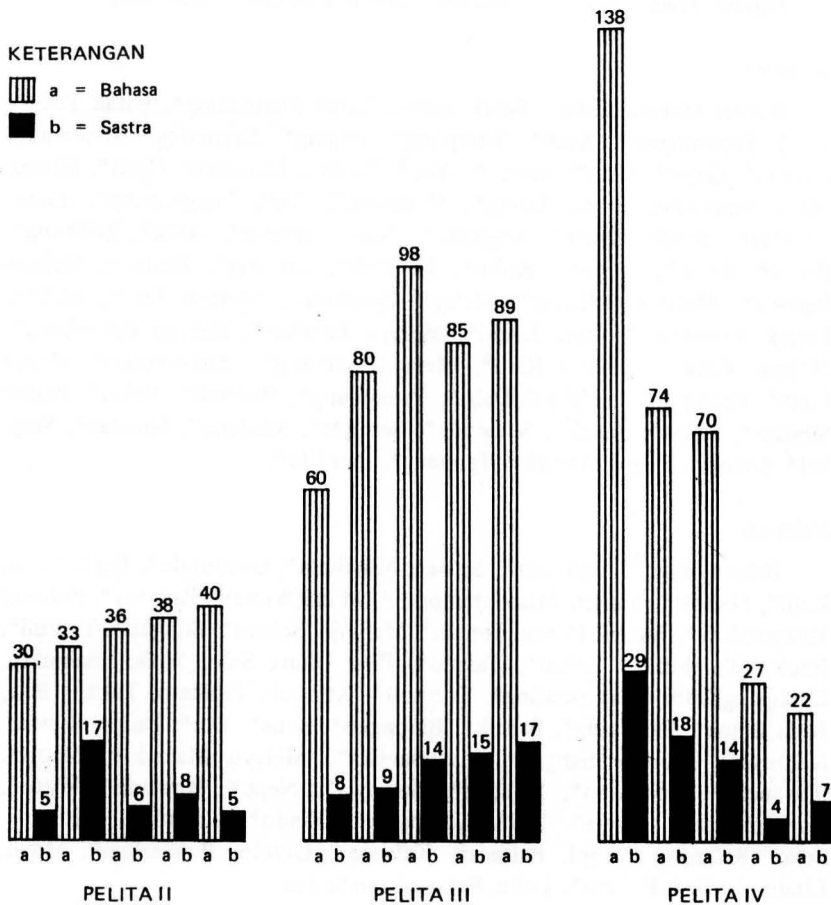


Lampiran 3:

HASIL PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH

KETERANGAN

 a = Bahasa

 b = Sastra


Lampiran 4 :

BAHASA DAERAH DI INDONESIA

Jawa, Bali, dan Madura

Bahasa Jawa*, Sunda*, Madura*, Melayu Betawi*, dan Bali*.

Sumatra

Bahasa Minangkabau*, Batak Karo*, Batak Mandailing*, Batak Toba*, Batak Simelungun*, Aceh*, Lampung*, Rejang*, Komering*, Basemah*, Kerinci*, Gayo*, Muri*, Rawas*, Alas*, Talana, Lematang, Ogan*, Ranau, Daya, Sumendo, Kayu Agung*, Mentawai*, Aji*, Lengkyang*, Lubu, Apuduat, Belide, Kluet*, Enggano*, Nias*, Abung*, Akik*, Belitung*, Bonai*, Enim*, Jamee*, Kubu*, Lembak*, Lintang*, Medan*, Melayu Bangka*, Melayu Belitung*, Melayu Bengkulu*, Melayu Deli*, Melayu Dialek Kuantan, Melayu Jambi*, Melayu Langkat*, Melayu Palembang*, Melayu Panai*, Melayu Riau*, Melayu Serdang*, Muko-muko*, Orang Laut*, Orang Ulu*, Pakpak/Dairi*, Palembang*, Panesak*, Pekal*, Pesisir Sibolga*, Sakai*, Sekak*, Semende*, Serawai*, Siladang*, Simelae*, Singkel*, Sokop*, Talang Mamak*, Tamiang*, dan Ulu*.

Sulawesi

Bahasa Bugis*, Makassar*, Sa'dan, Minahasa*, Gorontalo*, Bajo, Sama, Kaili*, Mandar*, Sangir, Massenrempulu*, Muna(Wuna)*, Pamona*, Bolaang Mongondow*, Buton, Dohoi, Tonsea*, Mamuju, Saluan*, Bungku*, Tomini*, Buol*, Tombulu*, Tolaki*, Talaud*, Pitu Uluna Salo, Wolio, Balantak, Kaidipang, Mori*, Tonsawang*, Toli-toli*, Atingola, Pipikaro, Tukang Besi, Bada Besoa*, Balaesang*, Bantik*, Binongko*, Bone*, Diu*, Dumei Bonda*, Kalisusu*, Manusa/Miangas*, Mawasangka*, Melayu Manado*, Maori*, Moronene*, Pnodaran*, Sangihe*, Suwawa*, Nepu*, Wawonii*, Wotu*, Tontambunan*, Toraja*, Uki*, Dampelas*, Dondo*, Kasimbar, Bintauna, Seko, Bolango, Rampi, Balaesan, Kalaotoa, Layolo, Ponosakan*, Mdau, Lindu, Andio*, Bolano*, Lobu, Petapa, dan Sedoa.

Kalimantan

Bahasa Arut*, Bajau*, Banjar Bukit*, Banjar Hulu*, Banjar Kuala*, Barito Selatan*, Baru*, Bawo*, Sayan*, Bedayah*, Bekatik*, Benoa*, Bosap*, Bulungan*, Iban*, Kahayan*, Kantuk*, Katingan*, Kendayan*, Kenyah*, Kutai*, Dayak Bakumpai*, Dayak Kerio*, Dayak Ngaju*, Dayak Sangen*, Dusun*, Dusan Deyah*, Lomansu*, Maanyan*, Melayu Pontianak*, Melayu Sambas*, Melayu Sanggau*, Ot Danum*, Paku*, Pasir*, Pesisir Timur Kalimantan*, Punan*, Sampit*, Sangen*, Siang*, Tamuan*, Tidung*, Barangas*, Lawangan*, Kapuas, Meratua, Geser Goram, Tunjung, Bakumpai, Kayan, Bukar Sadong, Bisaya, Ampanang, Melanau, Tidong, Beatah, Jagoi, Sumambu, Lun Daye, Modang, Rungus, Suluh, Tambanua, Mbaloh, Baram Tinja, Timuyon, Paluan, Illanum, Kuijau, Putoh, Bangai, Garo, Kimaragang, Klias, Latud, Tebilung, Tutong, Singie, Punan, Bintulu, Kinabatangan, Silakau, Bahau, Panihing, Lingkabau, Baukan, Kalebet, Kajaman, Gana, Kolod, Berawan, Papar, Kalabakan, Bukitam, Abai Sungai, Dumpas, Serundung, Bukat, Lakanan, Lara, Kanowit, dan Tanjong.

Nusa Tenggara

Bahasa Alor*, Bima*, Belagar*, Dawan*, Kambara*, Kedang*, Komodo*, Lio*, Manggarai*, Melayu Larantuka*, Melayu Lombok*, Monyekh*, Ngada*, Bakang Raras*, Roti*, Sabu*, Sasak*, Sikka*, Sumbawa*, Tetum*, Ende Lio, Riung, Atoni, Lamaholot, Aru, Kei, Palu'e, Tanimbar, Banggai, Sawu, Weyewa, Galoli, Kemak, Pantar, Kodi, Letri Lgoni, Abui, Lamboya, Anakalang, Tanglapui, Waisika, Kabola, Kelon, Selaru, Lamma, Waima'a, Kui, Kakalie, Tewa, Damar, Ndao, Nita Serua, Wetar, Roma, Sewasa, Kairui-Midiki, Dawera, Habu, Kafoa, Nauet, Nemebang, dan Teun.

Timor Timur

Bahasa Tetum, Mambai, Makasai, Bunah, Adabe, Tataluku, dan bahasa Idate.

Irian Jaya

Bahasa Bahaam*, Gresi*, Iha*, Kalabra*, Meyakh*, Moi*, Nafri*, Seget*, Skoi Tehit*, Tobati*, Ormu*, dan Waropen*.

Maluku

Bahasa Alune*, Aru*, Galela*, Gorrom*, Halmahera*, Ibu*, Kei*, Melayu Ambon*, Sanana*, Tanimbar*, Ternate*, Tidore*, Tobelo*, Waisima*, Weda*, Yamdena*, Seram, Nunusaku, Buru, Sula, Riru, Banda, Sula, Buru, Hitu, Sepa Teluti, Makian, Taliabo, Laloda, Tabaru, Haruku, Saku, Maka 'Ela, Sagai, Saparua, Luhu, Asilulu, Buli, Kesar, Maba, Nasiwang, Teor-Kun, Ambelau, Batumerah, Giman, Sawai, Manuasela, Babot, Bomberai, Pagu, Patani, Saleman, Boano, Kalabra, Madole, Atamanu, Manipa, Nuaulu, Kayeli, Matbat, Maya, Lisabata, Onin, Amahai, Kaibobo, Kawe, Maden, Lagayan, Gebe, dan Palamul.

*Sudah diteliti.

Lampiran 5 :

POETOESAN KONGGERES BAHASA INDONESIA

- I. Sesoadah mendengarkan dan memperkatakan prae-advies toean Mr. Amir Sjarifoedin tentang "Menyesoeaikan kata dan faham asing kedalam bahasa Indonesia", maka Konggres ternjata pada oemoemnja setoejoe mengambil kata-kata asing oentoek ilmoe pengetahoean. Oentoek ilmoe pengetahoean jang sekarang, Konggres setoedjoe kalau kata-kata itoe diambil dari perbendaharaan oemoem. Pekerdjaan itoe hendaklah dijalankan dengan hati-hati, karena itoe perkara itoe patoetlah diserahkan kepada satoe badan.
- II. Sesoadah mendengarkan dan bertoekar pikiran tentang prae-advies toean St. Takdir Alisjahbana hal "Pembaharoean bahasa dan oesaha mengatoernja", maka sependjang pendapatan Konggres, soedah ada pembaharoean bahasa jang timboel karena ada tjara berpikir jang baroe, sebab itoe merasa perloe mengatoer pembaharoean itoe.
- III. Sesoadah mendengarkan praeadvies toean-toean St. Takdir Alisjahbana dalil ke-IV dan Mr. Muh. Yamin, maka Konggres berpendapatan bahwa gramatika jang sekarang tidak memoeaskan lagi dan tidak menoeroet woedjoed bahasa Indonesia, karena itoe perloe menjoesoen gramatika baroe, jang menoeroet woedjoed bahasa Indonesia.
- IV. Orang dari berbagai-bagai golongan, dari berbagai-bagai daerah, ber-konggres di Solo pada tanggal 25-27 Juni 1938, setelah mendengarkan praeadvies toean K. St. Pamoentjak tentang "Hal edjaan bahasa Indonesia", dan setelah bertoekar pikiran tentang hal itoe, maka jang hadir berpendapat:
 bahwa edjaan baroe tidak perloe diadakan, sampai Konggres mengadakan edjaan sendiri,
 bahwa edjaan jang soedah berlakoe, jaitoe edjaan van Ophuysen oentoek sementara boleh diterima, tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhanaan, perloe dipikirkan perobahan seperti jang diseboetkan oleh praeadviseur,
 karena itoe berpengharapan:
 1. soepaja orang Indonesia selaloe memakai edjaan jang terseboet;

2. soepaja fractie Nasional di Volksraad mendesak Pemerintah oentoeik memakai edjaan seperti jang dimaksoedkan oleh Konggres;
 3. soepaja perhimpoean kaoem goeroe soeka membantoe poatoesan Konggres.
- V. Setelah mendengar praeadvies toean Adi Negoro, tentang "Bahasa Indonesia di dalam persoeratkabaran", maka sependjang pendapatan Konggres, soedah waktoenya kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoeik memperbaiki bahasa di dalam persoeratkabaran, karena itoe berharap soepaja Perdi bermoeepakat tentang hal itoe dengan anggota-anggotanja dan komisi jang akan dibentoeik oleh Bestuur Konggres jang baroe bersama-sama dengan Hoofdbestuur Perdi.
- VI. Sesoedah mendengarkan praeadvies Ki Hadjar Dewantara dalil jang ke-X jang disokong oleh toean R.M. Ng. dr. Poerbatjaroko, maka Konggres Bahasa Indonesia memoetoeskan:
bahwa Konggres berpendapatan dan mengandjoerkan, soepaja didalam pergoeroean menengah diadjarkan djoega edjaan internasional.
- VII. Sesoedah mendengarkan praeadvies toean Soekardjo Wirjopranoto tentang "Bahasa Indonesia dalam badan perwakilan", jang dioetjapkan dan dipertahankan oleh toean R.P. Soeroso, maka Konggres berpendapatan dan mengeloearkan pengharapan:
pertama: soepaja moelai saat ini bahasa Indonesia dipakai dalam segala badan perwakilan sebagai bahasa perantaraan (voertaal),
kedua: mengeloearkan pengharapan soepaja menoendjang oesaha oentoeik mendjadikan bahasa Indonesia bahasa jang sjah dan bahasa oentoeik oendang-oendang negeri.
- VIII. Sesoedah mendengar praeadvies toean Sanoesi Pane tentang "Instituut Bahasa Indonesia" dan mendengar pendirian Komite tentang hal itoe; maka Konggres Bahasa Indonesia memoetoeskan:
soepaja diangkat soetoe komisi oentoeik memeriksa persoalan mendirikan soeatoe Instituut Bahasa Indonesia dan Konggres mengharap soepaja mengoemoemkan pendapatan komisi tentang soal jang terseboet.
- IX. Sesoedah mendengarkan praeadvies toean-toean St. Takdir Alisjahbana, Mr. Muh. Yamin dan Sanoesi Pane, maka Konggres berpendapatan, bahwa oentoeik kemadjoean masjarakat Indonesia, penjelidikan bahasa dan kesoesasteraan dan kemadjoean keboedajaan bangsa Indonesia, perloe didirikan Pergoeroean Tinggi Kesoesteraan dengan selekas-lekasnya.

KEPUTUSAN KONGRES BAHASA II

Keputusan Seksi A: Dasar-dasar Edjaan Bahasa Indonesia dengan Huruf Latin

Kongres Bahasa Indonesia jang berlangsung dari tanggal 28 Oktober s/d tgl. 2 Nopember 1954 di Medan, setelah membatja, menelaah dan membahas preadvis jang dikemukakan oleh Prof. Dr. Prijana, memutuskan:

1. mengusulkan kepada Pemerintah mengadakan suatu Badan Kompeten jang diakui oleh Pemerintah untuk: a. dalam djangka pendek menjusun Tatabahasa Indonesia jang normatif bagi S.R., S.L.P., S.L.A. dll.; b. dalam djangka pandjang menjusun suatu tatabahasa deskriptif jang lengkap.
2. Mengusulkan kepada Pemerintah, agar anggota2 Badan tersebut terdiri dari:
 - a. seorang sardjana bahasa, sebagai ketua.
 - b. seorang dari Pers sebagai Anggota.
 - c. seorang dari Radio sebagai Anggota.
 - d. beberapa orang ahli bahasa, sebagai Anggota.
 - e. beberapa orang sardjana bahasa, sebagai penasehat.
 - f. d.l.l. jang dianggap perlu.
3. Memberi tugas kepada Badan tersebut untuk menjiapkan rentjana dalam djangka waktu jang ditentukan.
4. Mengusulkan agar Badan tersebut dipimpin oleh seorang jang tjakap memimpin dan memang menundjukkan kegiatannja dalam perkembangan bahasa Indonesia.
5. Mengusulkan supaja badan tersebut selalu mengadakan koordinasi dengan badan2 jang ada sangkut-pautnja dengan bahasa.
6. Mengusulkan agar Badan tersebut bekerdja dengan sistim diachronis dengan menentukan tanggal tertentu sebagai waktu titik permulaan penjelidikannya.

7. Mengusulkan agar Pemerintah berusaha supaya hasil Pekerdjaan Badan tersebut dijadikan suatu tatabahasa jang dilindungi dengan undang2.
8. Bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melaju. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melaju jang disesuaikan dengan pertumbuhannja dalam masyarakat Indonesia sekarang.

Kongres Bahasa Indonesia jang berlangsung dari tanggal 28 Oktober s/d tgl. 2 Nopember 1954 di Medan, setelah membatja, menelaah dan membahas preadvis jang dikemukakan oleh Sdr. Prof. Dr. Prijana, memutuskan:

- I. Menjetudjui sedapat-dapatnya menggambarkan 1 fonem dengan 1 tanda (huruf).
- II. Menjetudjui menjerahkan penjelidikan dan penetapan dasar2 edjaan selandjutnja kepada suatu badan kompeten jang diakui oleh Pemerintah.
- III. Mengusulkan agar Badan tersebut berusaha menjusun:
 - a. Suatu aturan edjaan jang praktis untuk keperluan sehari-hari dengan sedapat mungkin mengingat pertimbangan ilmu.
 - b. Suatu "Logat Bahasa Indonesia" jang halus, berdasarkan penjelidikan jang saksama dengan mempergunakan alat2 modern.
- IV. Menjetudjui agar edjaan untuk kata2 asing jang terpakai dalam bahasa Indonesia, ditetapkan sesungguh penjusunan edjaan bahasa Indonesia asli terlaksana, dengan pengertian bahwa untuk kata2 Arab diadakan kerja sama dengan Kementerian Agama.
- V. Mengusulkan agar edjaan itu ditetapkan dengan undang2.

Keputusan Seksi B: Bahasa Indonesia didalam Perundang-undangan dan Administrasi

Seksi B dalam Kongres Bahasa Indonesia jang dilangsungkan di Medan sedjak tanggal 28 Oktober 1954 s/d tgl. 2 Nopember 1954, setelah membatja praeadvis saudara Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dan setelah membatja serta mempertimbangkan preadvis saudara Mr. Koentjoro Poerbopranoto, mengambil kesimpulan2 seperti teriring di bawah ini:

- I. Supaja Pemerintah segera membentuk Panitia Negara, seperti jang dimaksudkan dalam pasal 145 U.U.D.S., dengan ketentuan bahwa, disamping tugas jang dimaksud dalam pasal tersebut, supaja kepada Panitia di bebaskan djuga kewadajiban sebagai berikut:

- A. Mengadakan pembetulan/penjempurnaan, jang dipandang perlu dalam bahasa Indonesia di dalam Undang2.
Undang2 Darurat, Peraturan2 Pemerintah dan Peraturan2 Negara jang lain, misalnja:
 1. Kata "kebutuhan", sebab kata ini adalah kata tjabul dalam Bahasa Daerah. Umumnja, kata2 tjabul dari Bahasa Daerah djanganlah dipergunakan.
 2. Kata "retributie" (lihat pasal 2 L.N. 1953 No. 4). Demikian djuga seperti kata2 "rel", "ondernemeng" dalam T.L.N. no. 353, "diimporteer", "pabrikasi rokok", dalam T.L.N. no.350, "legaliseer", "aparatur", L.L.N. no.351, "inrichting van het onderwijs", T.L.N. no.351. Umumnja kata2 asing jang mudah mendapat pengantiannja djangan dipergunakan.
 - B. Memeriksa bahasa rantjangan Undang2 Darurat, dan Peraturan2 Negara jang lain, sebelum ditetapkan.
 - C. Mendjaga supaya istilah2 hukum bersifat tetap, terang dan djangan berobah sebelum mendapat persetudjuan Panitia tersebut.
- II. Didalam Panitia tersebut di sub I didudukkan sebagai anggota selain dari pada ahli2 Hukum dan Bahasa, djuga ahli2 Adat, ahli2 Agama dan ahli2 Hukum Agama.
 - III. Didalam Seksi Hukum dari Komisi Istilah hendaklah djuga didudukkan ahli2 Hukum Agama sebagai anggota.
 - IV. Untuk mentjapai KESERAGAMAN istilah Hukum jang dipakai dalam Dunia Perguruan Tinggi dan Perundang-undangan hendaklah para Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi dan para Sardjana Hukum pada waktu2 jang tertentu mengadakan pertemuan.
 - V. Supaja pihak Pemerintah tetap memakai istilah jang sama untuk satu pengertian hukum, misalnya: "atas kuasa Undang2", (Undang-undang Dasar pasal 101 ayat 1) contra "berdasarkan" dalam L.N. 1953 no. 4.
 - VI. Supaja sesuatu istilah senantiasa ditulis dalam bentuk jang sama, misalnya: "diubah", "dirubah", "dirobah", (l'n' 1954 no. 39). L.N. 1953 no. 4 pasal 1). "Dewan Pemerintah Harian", (T.L.N. 353) contra "Dewan Pemerintah Daerah", (U.U.R.I. 1948 no. 22).
 - VII. Menjetudjui seluruhnja kesimpulan2 dari no. 1 s/d 6, jang diperbuat oleh saudara Mr. Koentjoro Poerbopranoto pada achir preadvisnja, jang berbunji sebagai berikut:

1. Bahasa-Hukum Indonesia adalah bahagian dari bahasa umum Indonesia yang meliputi lapangan Hukum dalam masyarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penjelenggaraan pengadilan oleh instansi2 yang diakui oleh undang-undang. Instansi2 itu adalah instansi2 resmi Pengadilan pun pula badan2 atau petugas2 yang menurut Adat dan Agama disertai penjelenggaraan Hukum Adat, dan Hukum Agama, termasuk Pengadilan Swapradja (dimana masih ada).
2. Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dan administrasi adalah bahagian bahasa-hukum Indonesia tertulis, yang dipergunakan dalam perundang-undangan dan administrasi, yaitu oleh instansi2 resmi yang disertai dengan penjelenggaraan administrasi dan pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk pengitaban hukum (codificatie) dan pentjataan hukum (rechtsregistratie).
3. Persoalan2 mengenai bahasa Indonesia pada umumnya berlaku pula terhadap dan berpengaruh pada bahasa Hukum (termasuk pula bahasa perundang-undangan dan bahasa administrasi) kita.
4. Dalam mentjari, menggali, menghimpun dan membentuk istilah Hukum Indonesia sejogjanja dipakai dasar:
 - a. bahan-bahan dari bahasa daerah yang meliputi seluruh daerah Hukum Indonesia.
 - b. kata-kata istilah dari Bahasa Asing yang menurut sedjarah dan pemakaiannya sudah memperoleh kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia;
 - c. kata-kata istilah bentukan baru yang menurut perhitungan baik berdasarkan isinja maupun pengutjapannya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat umum.
5. Dalam lapangan administrasi sangat besar gunanya kesamaan bentuk atau keseragaman guna melantjarkan penjelesaian surat menjurat dan memudahkan pemetjahan soal yang dihadapi. Berhubung dengan itu lazimlah dipakai dalam administrasi tjara penjelesaian soal yang disebut "afdoening volgens antecedent/precedent".
6. Adalah satu keuntungan besar dalam sedjarah Kebudayaan Bangsa kita, bahwa sebagai salah satu hasil revolusi Bangsa Indonesia telah dapat ditetapkan satu Bahasa Kesatuan dan Bahasa Resmi jaitu Bahasa Indonesia.

Keputusan Seksi C: Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmiah dan Kamus Etimologi Indonesia

Seksi C. Kongres Bahasa Indonesia 1954, setelah dalam sidang2nja mem-perbincangkan preadvis Prof. Dr. Prijohutomo tentang Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan Kamus Etimologis Indonesia, mengambil keputusan/ kesimpulan untuk disarankan kepada sidang Pleno Kongres jang dapat di-rumuskan demikian:

A. Mengenai Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah Kongres berpendapat:

1. Bahasa Indonesia dalam pertumbuhan dan perkembangannya kearah kesempurnaan pada dewasa ini, tidaklah mengalami banjak kesukaran dalam pemakaiannya sebagai bahasa ilmiah.
2. Maka untuk lebih menjempurnakan bahasa Indonesia mendjadi bahasa ilmiah dan kebudajaan didalam arti seluas-luas dan sedalam-dalamnja, perlu ditjiptakan iklim dan suasana sedemikian rupa, sehingga bahasa tersebut dapat berkembang setjara mulus sempurna.
3. Iklim dan suasana tersebut hanya mungkin ada djika ditetapkan dengan tegas politik bahasa sebagai tindakan organik terhadap pasal 4 UUDS jang berbunyi "Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia". Di dalam politik itu sekurang-kurangnya haruslah ditetapkan usaha2 jang njata didalam rangka pembangunan nasional antara lain.
 - a. Pendirian Djawatan Penterdjemah Negara jang kompoten, dengan diberi perlengkapan personalia, peralatan, dan keuangan jang tjukup.
 - b. Sikap terhadap kedudukan bahasa daerah, sebagai sumber kebudayaan dan kekajaan bahasa nasional.
 - c. Sikap tegas terhadap bahasa asing, misalnja penindjauan kembali pengadjaran bahasa Inggeris disekolah landjutan jang sekarang dilakukan dengan setjara meluas dan merata, dengan kemungkinan menggantinya dengan sekolah2 bahasa asing (Foreign Linguistic Schools) untuk kepentingan negara dalam hubungan Internasional.
 - d. Adanja mimbar kuliah bahasa Indonesia, bahasa2 daerah, antara lain Melaju, Djawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, Minangkabau, bahasa2 daerah Tapanuli, Atjeh d.l.l.

- e. Adanja mimbar kuliah bahasa asing terutama bahasa2 tetangga, misalnja bahasa Arab, Sanskerta, Urdu, Tionghoa, d.l.l.
 - f. Huruf Arab jang biasa disebut huruf Melaju supaya tetap diadajarkan disekolah-sekolah didaerah jang memakainja.
- B. Mengenai ichtiar untuk memperlengkap kata2 jang diperlukan didalam dunia Ilmu pengetahuan dan kebudajaan, maka Kongres Bahasa Indonesia mengandjurkan:
- 1. Istilah2 jang telah biasa dipakai saat ini, diakui.
 - 2. Istilah jang telah disiarkan oleh Komisi Istilah, supaya disaring dengan djalan berpegang kepada pengertian keseluruhannja, dan tidak hanja merupakan penterdjemahan kata2 bahagiannja.
 - 3. Semua istilah Internasional dalam lapangan ilmiah dan kebudajaan diterima dengan ketentuan diselaraskan dengan lisan Indonesia, apa bila perlu dan tidak merusak pengertiannja.
 - 4. Untuk memperkaja perbendaharaan kata bahasa Indonesia, hendaklah terutama diambil kata2 dari bahasa daerah dan bahasa jang serumpun.
- C. Andjuran2.
- 1. Mengandjurkan supaya para sardjana Indonesia mengadakan pertemuan2 keahlian untuk membahas ilmu pengetahuan dalam lapangannja dengan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
 - 2. Mengandjurkan kepada para sardjana untuk mengarang buku tentang keachliannja dalam bahasa Indonesia.
 - 3. Mengandjurkan kepada pemerintah untuk memberikan penghargaan dan honorarium jang tjukup menarik untuk setiap karangan dan hasil keahlian dan kesusasteraan jang diterima.
 - 4. Mengadakan perpustakaan untuk semua sekolah dan masjarakat jang tjukup lengkap.

Mengenai preadvis tentang Kamus Etimologis Indonesia, Kongres berpendapat supaya Pemerintah segera mendirikan sebuah Lembaga untuk menjusun-Kamus Etimologis Indonesia.

Selandjutnja Panitia Perumus mengambil keputusan untuk mengusulkan supaya mengumumkan kepada masyarakat:

- a. Pedato pembangkang utama Sdr. Hamka.
- b. Pedato Herman Busser.
- c. Pedato Prof. Dr. A.A. Fokker.

Keputusan Seksi D1: Bahasa Indonesia dalam Pergaulan Sehari-hari

1. Di dalam pergaulan sehari-hari, jaitu didalam perhubungan antara manusia jang bersifat bebas dilapangan hidup jang bebas hendaklah senantiasa diusahakan dan diutamakan pemakaian Bahasa Indonesia sebanjak-banyaknya didalam bentuk jang sebaik-baiknya.
2. Untuk mentjapai tudjuan ini, haruslah ada usaha pengembangan Bahasa Indonesia jang dilakukan dengan insjaf dan menurut rentjana jang teratur, berdasarkan kesadaran dan kejakinan berbahasa satu, disertai usaha penjempurnaan Bahasa Indonesia jang harus ditjantumkan sebagai atjara penting dalam rangka pembangunan nasional.
3. Politik bahasa jang tegas jang mampu menjuburkan rasa tjinta kepada bahasa Indonesia dan jang sanggup melenjapkan rasa kurang-harga-diri, terhadap bahasa asing, hendaklah mengatur kedudukan Bahasa Indonesia dan hubungan bahasa ini dengan bahasa-bahasa daerah, baik di sekolah, sedjak dari sekolah rendah sampai ke perguruan tinggi maupun di dalam masyarakat.
4. Sebagai dasar politik bahasa itu hendaklah ditetapkan:
 - a. Sesuai dengan U.U.D.S. R.I. bahasa resmi negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
 - b. Pengembangan Bahasa Indonesia tidak boleh bermaksud menahan perkembangan bahasa-bahasa daerah dan pengembangan bahasa-bahasa daerah tidak boleh pula bermaksud menolak Bahasa Indonesia.
5. Guna memudahkan dan melantjarkan perkembangan Bahasa Indonesia mendjadi bahasa pergaulan sehari-hari bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai bahasa-ibunja, haruslah ada bimbingan jang njata pada pertumbuhan dan pembinaan Bahasa Indonesia itu.
6. Oleh karena itu seksi mengandjurkan supaya dibentuk suatu Lembaga Bahasa Indonesia jang antara lain dapat diberi tugas sebagai berikut:
 - a. Mengadakan usaha-usaha pemakaian Bahasa Indonesia jang meluas

dan mendalam disegala lapangan hidup dan untuk segala lapisan masyarakat.

- b. Mengadakan usaha mempertinggi nilai dan mutu Bahasa Indonesia dengan memberikan bimbingan yang tegas dalam penggunaan Bahasa Indonesia.
 - c. Dalam waktu sesingkat-singkatnya menyusun suatu tatabahasa Indonesia yang bersahaja dan normatif, terutama untuk dipakai di sekolah-sekolah.
 - d. Mengusahakan kesempurnaan edjaan Bahasa Indonesia.
 - e. Mengusahakan adanya penghargaan yang sewadjarja dari dunia luar.
7. Sekolah-sekolah rakyat yang merupakan pesemaian benih-benih bahasa pergaulan sehari-hari dalam bentuk yang semurni-murninya disamping usaha pemberantasan buta huruf yang dijalankan dengan mempergunakan sematjam basic Indonesia, dan radio, pilem serta persurat-kabaran haruslah dengan insjaf membantu sekuat-kuatnya perkembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia itu.

Untuk mendjamin pemakaian Bahasa Indonesia yang baik di lapangan tersebut di atas, mestilah ada penelitian dan pengawasan yang saksama oleh Lembaga Bahasa Indonesia dan Pemerintah.

Keputusan Seksi D2: Bahasa Indonesia dalam Prosa dan Puisi

Seksi D Kongres Bahasa Indonesia 1954, dengan menjesalkan: tidak diundangnja para sastrawan Indonesia, setelah dalam sidangnja memperbintjangkan preadvis Bahrum Rangkuti tentang "Bahasa Indonesia dalam prosa dan puisi", mengambil keputusan-keputusan yang dapat dirumuskan sbb.:

1. Beda Bahasa Indonesia dari Bahasa Melaju nyata sekali dalam prosa dan puisinja, djadi dalam kesusasteraannja. Dapatlah dikatakan bahwa Bahasa Indonesia dalam kesusasteraannja lebih banjak variasi-nja dari Bahasa Melaju dalam seni prosa dan puisinja. Meskipun begitu masih banjak djenis kesusasteraan Melaju klasik yang patut mendjadi perhatian, bahkan mungkin mendjadi perangsang bagi perkembangan kesusasteraan Bahasa Indonesia.
2. Perlu diadakan Balai Penterdjemah Sastra yang bertugas mengusahakan terdjemahan hasil-hasil sastra dunia dan sastra daerah Indonesia.
3. Perlu dilakukan penjelidikan yang luas dan mendalam tentang kesusasteraan bahasa-bahasa Indonesia dan hasil kesusasteraan bahasa-bahasa tetangga (India, Farsi, Arab, dsb.) yang zat-zatnja ada menge-

sahkan pengaruh pada sastra Melaju klasik maupun Indonesia modern.

4. Perlu diterbitkan berbagai naskah kepustakaan Melaju klasik disamping hasil-hasil kesusasteraan Indonesia modern. Demikian juga berbagai pendapat para sardjana dan sastrawan mengenai hasil kesusasteraan Melaju klasik dan bahasa Indonesia yang tersebar di berbagai madjalah, naskah dan buku.
5. Perlu diusahakan buku-buku yang menguraikan stilistik Bahasa Indonesia dengan memperhatikan sifat dan luasan kesusasteraan Indonesia dan penjelidikan yang luas tentang logat Bahasa Melaju di berbagai daerah Nusantara (termasuk tanah Melaju) untuk mengetahui inti-hakikat prosodi Bahasa Indonesia.
6. Perlu diwujudkan perpustakaan kesusasteraan yang lengkap di sekolah, baik rendah, landjutan maupun seterusnya.
7. Perlu ada usaha menggiatkan tunas muda kesusasteraan Indonesia, antaranja sekolah sandiwara, deklamasi dsb.

Keputusan Seksi D3: Bahasa Indonesia dalam Pilem

- I. Jang dimaksud dengan bahasa pilem jaitu salah satu alat pengutaraan fikiran, perasaan, kehendak dll.
Jang dimaksud dengan bahasa dalam pilem jaitu salah satu unsur bahasa pilem disamping gambaran dan bunji-bunjian lain.
Bahasa dalam pilem dapat terdiri dari pertjakapan, komentar, pentjeritaan dll.
- II. Pilem diakui sebagai salah satu alat penting untuk menjebarkan dan mengembangkan bahasa Indonesia serta membuat bahasa Indonesia populer dikalangan segala lapisan masjarakat di seluruh tanah air.
- III. Pilem dapat membantu proses pertumbuhan Bahasa Indonesia Umum a.l. dengan mentjernakan bahasa-bahasa daerah, baik dalam idiomnja, istilahnja, tjara pengutjapannja dll., ke dalam Bahasa Indonesia.
- IV. Tidaklah sewadjarnja diadakan suatu paksaan untuk mendapatkan bahasa Indonesia yang sedjenis (uniform) untuk pilem, karena dalam mentjiptakan sebuah pilem haruslah disesuaikan bahasanja dengan ragam tjeritera, yang berbeda-beda menurut suasana dan daerah. Djuga karena paksaan sematjam itu bertentangan dengan dasar pentjiptaan seni setjara bebas.

- V. Mengandjurkan kepada pembuat-pembuat pilem untuk memakai Bahasa Indonesia jang baik, jang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu hasil pentjiptaan seni jang sempurna.
- VI. Karena fungsinya jang penting itu, sewadarnjalah persoalan pilem lebih banjak mendapat perhatian dari Pemerintah, terutama dari Kem. P.P. dan K. dengan tjara mendjalankan politik pilem jang lebih aktif.
- VII. Supaja teks terdjemahan pilem luar negeri diperhatikan oleh Panitia Sensor Pilem.
- VIII. Untuk mendjaga pemakaian Bahasa Indonesia jang baik dalam pilem supaja bahasa dalam pilem itu melalui Panitia Sensor Pilem Indonesia.

Keputusan Seksi E: Fungsi Bahasa didalam Pers, Bahasa Indonesia dalam Pers dan Bahasa Indonesia dalam Penyiaran Radio

Seksi E dari Kongres Bahasa Indonesia jang bersidang pada tanggal 30 dan 31 Oktober 1954 bertempat di Balai Wartawan dan Balai Polisi di Medan, setelah menerima baik preadvis² tentang Fungsi Bahasa di dalam Pers, Bahasa Indonesia dalam Pers dan Bahasa Indonesia dalam penjiaran radio, dengan suara bulat telah memutuskan untuk mengandjurkan kepada sidang Kongres supaja mengambil resolusi tentang Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio, sebagai berikut.

Resolusi tentang Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio

Memperhatikan:

Tudjuan Kongres jang dimaksudkan menindjau kedudukan dan kegunaan bahasa Indonesia dalam segenap lapangan hidup, baik sebagai bahasa pergaulan maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan, agar menjadi pegangan bagi penjelidikan selandjutnja dinegeri kita dan akan berharga pula bagi penjelidikan bahasa di-negara² tetangga.

Mengingat:

- (1) Pers dan Radio bertugas melaksanakan alat hubungan semesta (mass-communication),
- (2) Bahasa itu merupakan alat dari pada Pers dan Radio,
- (3) Alat daripada Pers dan Radio Indonesia adalah Bahasa Indonesia,

- (4) Bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa selalu dalam pertumbuhan,
- (5) Tatabahasa pada hakikatnja melukiskan pertumbuhan bahasa didalam masjarakat (deskriptif) dengan teliti.

M e n i m b a n g :

- (1) Pers dan Radio wadajib dan berhak melaksanakan tugasnja dengan sebaik2nja,
- (2) Bahasa sebagai alat Pers dan Radio harus dibuat seefektif2nja atau didjadikan se-baik2nja,
- (3) Kebaikan bahasa sebagai alat Pers dan Radio terletak pada sifat mudah dan djelas,
- (4) Sifat mudah dan djelas itu tertjapai djika mengikuti pertumbuhan bahasa dengan timbulnja kata2, langgam2, gaja dan ungkapan2 baru didalam masjarakat.

Menjatakan pendapat sebagai berikut :

- (1) Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio tak dapat dianggap sebagai bahasa jang tak terpelihara dan rusak,
- (2) Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio adalah bahasa masjarakat umum jang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masjarakat,
- (3) Pers dan Radio hendaknja sedapat mungkin berusaha memperhatikan tatabahasa jang resmi,
- (4) Menganggap perlu supaya diandjurkan adanja kerjasama jang lebih erat antara Pers dan Radio dengan Balai2 Bahasa.

Medan, 1 Nopember 1954

Pimpinan Kongres

1. Mr. Mahadi
2. Dr. A. Sofjan
3. Prof. Prijana

KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA III

Kongres Bahasa Indonesia III, yang berlangsung dari hari Sabtu tanggal 28 Oktober 1978 sampai dengan hari Jumat tanggal 3 November 1978 di Hotel Indonesia Sheraton, Jakarta, dengan memperhatikan pidato peresmian pembukaan Kongres Bahasa Indonesia III oleh Presiden Republik Indonesia, Suharto, pada tanggal 28 Oktober 1978 dan pidato pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Joesoef, pada tanggal 30 Oktober 1978, serta setelah mendengarkan kertas-kertas kerja yang disajikan dan dibahas secara mendalam, baik dalam sidang-sidang lengkap maupun di dalam sidang-sidang kelompok, mengambil keputusan berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan :

1. kebijaksanaan kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan nasional;
2. bidang pendidikan;
3. bidang komunikasi;
4. bidang kesenian;
5. bidang linguistik;
6. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut.

I. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Kebijaksanaan Kebudayaan, Keagamaan, Sosial, Politik, dan Ketahanan Nasional

a. Kesimpulan Umum

Bahasa adalah unsur yang berpadu dengan unsur-unsur lain di dalam jaringan kebudayaan. Pada waktu yang sama bahasa merupakan sarana pengungkapan nilai-nilai budaya, pikiran, dan nilai-nilai kehidupan kemasyara-

katan. Oleh karena itu, kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebahasaan harus merupakan bagian yang integral dari kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebudayaan.

Perkembangan kebudayaan Indonesia ke arah peradaban modern sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya perkembangan cara berpikir yang ditandai oleh kecermatan, ketepatan, dan kesanggupan menyatakan isi pikiran secara eksplisit. Ciri-ciri cara berpikir dan mengungkapkan isi pikiran ini harus dipenuhi oleh bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan sebagai sarana berpikir ilmiah dalam hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi masyarakat Indonesia. Selain itu, mutu dan kemampuan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi keagamaan perlu pula ditingkatkan. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia memiliki kesanggupan menyatakan dengan tegas, jelas, dan eksplisit konsep-konsep yang rumit dan abstrak serta hubungan antara konsep-konsep itu satu sama lain. Untuk mencapai tujuan ini harus dijaga agar senantiasa terdapat keseimbangan antara kesanggupan bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah dan identitasnya sebagai bahasa nasional Indonesia.

Identitas kebangsaan Indonesia dimanifestasikan bukan saja oleh bahasa Indonesia, melainkan juga oleh bahasa-bahasa daerah. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus diimbangi dengan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sesuai dengan penjelasan Bab XV Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam hubungan ini diperlukan adanya keseimbangan antara sikap bahasa yang positif, baik terhadap bahasa Indonesia maupun terhadap bahasa daerah dan perilaku berbahasa, dan antara sikap bahasa perseorangan dan sikap bahasa bangsa yang dinyatakan di dalam kebijaksanaan bahasa nasional.

Sejarah kebangsaan Indonesia memperlihatkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia memiliki hubungan isi-mengisi dengan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi -- baik dalam hubungan dengan perkembangan urbanisasi maupun dalam hubungan dengan kehidupan pedesaan -- serta kehidupan politik di Indonesia. Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik telah mewarnai perkembangan bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sarana komunikasi antardaerah, antarsuku, dan antarbudaya telah memungkinkan terjadinya perkembangan kehidupan kebudayaan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik seperti yang kita miliki hingga saat ini. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia yang semula merupa-

kan sarana pembebasan dari kekangan stratifikasi sosial, dewasa ini menunjukkan kecenderungan ke arah pembedaan kedudukan sosial dalam masyarakat. Kecenderungan ini perlu diatasi demi keutuhan identitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang demokratis.

Di dalam hubungan dengan peningkatan isi dan makna kemerdekaan Indonesia bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan peningkatan kewibawaan serta identitas bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat antarbangsa, terutama dalam lingkungan Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), bahasa Indonesia merupakan sarana yang diandalkan untuk meningkatkan ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamik yang ditandai oleh adanya keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Hanya dengan wibawa yang besar dan identitas yang tegas dan nyata, bangsa Indonesia dapat memainkan peranan yang berpengaruh di dalam pergaulan masyarakat dunia.

Bahasa Indonesia dapat dikembangkan dan diperkaya dengan unsur-unsur bahasa daerah dan, apabila perlu, dengan unsur-unsur bahasa asing. Unsur-unsur serapan itu haruslah terbatas pada unsur-unsur yang sangat diperlukan dan yang padanannya yang tepat tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Oleh karena kebijaksanaan bahasa nasional merupakan bagian integral kebijaksanaan kebudayaan nasional, dan disusun dalam konteks kebijaksanaan kebudayaan nasional itu, maka perlu segera diadakan Kongres Kebudayaan Nasional dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh nasional yang berpengalaman dalam bidang kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.
- (2) Pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional memerlukan partisipasi segenap lapisan masyarakat. Dalam hubungan ini perlu dibentuk Dewan Nasional Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang berfungsi mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa dan yang berpengalaman dalam bidang kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.
- (3) Sikap bahasa yang positif, perilaku berbahasa, dan kebiasaan berbahasa

Indonesia dengan baik dan benar perlu ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mencapai tujuan ini perlu dikembangkan lingkungan kebahasaan yang positif pula. Dalam hubungan ini, iklan serta papan nama toko, perusahaan, dan lain-lain yang tertulis dalam bahasa asing perlu diindonesiakan.

- (4) Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan cara berpikir ilmiah, buku-buku dan bahan kepustakaan ilmiah lain yang tertulis dalam bahasa asing perlu disebarluaskan dengan jalan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini perlu segera dibentuk Badan Penerjemahan Nasional dengan wewenang, dana, dan tenaga profesional yang cukup.
- (5) Kesimbangan antara sikap bahasa yang positif dan perilaku berbahasa dapat dicapai dengan menjadikan kemahiran berbahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian dalam sektor pemerintah, baik dalam lingkungan sipil maupun dalam lingkungan militer serta dalam sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan sarana perundang-undangan untuk mengatur penggunaan kemahiran bahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian.

II. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Pendidikan

a. Kesimpulan Umum

Perkembangan bahasa Indonesia seperti yang kita miliki dewasa ini telah dimungkinkan oleh usaha para pendidik. Sebaliknya, perkembangan pendidikan kebangsaan kita telah dimungkinkan berkat adanya bahasa Indonesia.

Bidang pendidikan merupakan wadah dan lingkungan formal yang harus menerima anak didik dari semua suku bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, dan sesuai pula dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional adalah (1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok dan (2) sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang sekolah.

Bahasa daerah masih dapat dipakai untuk membantu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas satu sampai dengan kelas tiga sekolah dasar di daerah-daerah yang masih memerlukannya. Di samping itu, bahasa daerah dapat pula diajarkan sebagai mata pelajaran.

Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah untuk sarana komunikasi antarbangsa dan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari buku-buku berbahasa asing.

Sehubungan dengan pemakaian tiga kelompok bahasa yang dikemukakan di atas, hal yang tidak menggembirakan ialah kenyataan bahwa pada sebagian anggota masyarakat terjadi percampuradukan pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dan bahasa asing. Hal itu mungkin dapat diatasi dengan pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar oleh semua guru.

Perolehan bahasa daerah sebagai bahasa ibu yang berjalan secara alamiah jalin-berjalin dengan perkembangan persepsi, daya abstraksi, perasaan, dan pengetahuan seorang anak. Oleh karena itu, proses belajar-mengajar bahasa Indonesia dengan pendekatan makro yang mencakup pembinaan melalui semua mata pelajaran dan lingkungan sosial yang lebih luas akan lebih menguntungkan.

Masukan (*input*) instrumental pendidikan bahasa mencakup kurikulum, guru, dan sarana pendidikan. Kurikulum pendidikan bahasa Indonesia pada semua jenjang sekolah harus berkesinambungan. Guru yang memegang peranan kunci dalam proses mengajar tidak selalu menggembirakan kualifikasi dan jumlahnya. Demikian pula halnya dengan sarana pendidikan seperti buku-buku pelajaran dan buku bacaan.

Khusus mengenai buku-buku terdapat beberapa masalah. Pertama, jumlah dan jenis buku yang diperlukan oleh guru dan murid belum memadai. Kedua, perpustakaan sekolah yang bertanggung jawab untuk pembinaan buku-buku dan media bacaan lainnya belum berkembang sebagaimana mestinya; petugas perpustakaan sangat kurang. Ketiga, buku-buku pelajaran masih banyak yang belum memenuhi syarat, baik dari segi ejaan dan tanda baca maupun dari segi bahasa dan isinya.

Minat baca di kalangan murid pada umumnya cukup memadai, kecuali minat baca untuk buku ilmu pengetahuan. Dukungan yang diperlukan untuk pengembangan minat baca ternyata masih kurang dalam pengajaran bahasa Indonesia.

Pelajaran sastra belum merupakan mata pelajaran yang mandiri. Sastra diajarkan sebagai sambilan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tenaga pengajar dan buku yang diperlukan masih kurang.

Keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan ternyata belum memenuhi syarat minimum bagi peng-

gunaan bahasa Indonesia, baik untuk kepentingan pendidikan tinggi maupun untuk kepentingan komunikasi umum di dalam masyarakat. Keadaan ini perlu segera diatasi.

Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan masyarakat umum, termasuk para pejabat, di luar lembaga pendidikan formal perlu ditingkatkan.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Untuk meningkatkan mutu keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan mutu pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan sekolah lanjutan harus segera diperbaiki dengan jalan menyediakan bahan pengajaran yang bermutu, mengembangkan metode dan sarana pengajaran yang lebih baik, dan meningkatkan mutu pendidikan guru sesuai dengan tujuan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan lanjutan. Selain itu, guru-guru terutama guru-guru bahasa Indonesia harus segera diberi penataran dalam keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, penggunaan metode dan sarana pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan pengembangan inovasi pendidikan kebahasaan.
- (2) Kebiasaan dan keterampilan menulis, termasuk menulis laporan ilmiah, harus dikembangkan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Sejalan dengan itu, perlu pula dikembangkan keterampilan membaca cepat.
- (3) Perlu segera diadakan penelitian mengenai masalah-masalah konkret tentang keserasian kurikulum bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang sekolah dan kemampuan sarana penunjang seperti buku-buku murid, penuntun guru, perpustakaan, dan alat peraga.
- (4) Peranan perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan dan buku-buku dilengkapi. Guru perlu ditatar untuk menjadi guru pustakawan.
- (5) Buku-buku pelajaran perlu diteliti dan dievaluasi ketepatan isi dan keserasian bahasanya. Harga buku perlu diturunkan agar dapat terjangkau oleh daya beli orang tua murid.
- (6) Keragaman buku pelajaran untuk murid-murid yang berbeda latar be-

lakang bahasa ibunya atau tingkat kemampuan bahasa Indonesianya perlu dikembangkan.

- (7) Untuk mempercepat proses evaluasi buku, maka wewenang pelaksanaannya perlu diserahkan kepada tim daerah. Tim ini dapat dibentuk pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keanggotaan tim harus mewakili ahli bahasa, ahli pendidikan, dan ahli bidang studi yang bersangkutan.
- (8) Untuk menghilangkan keraguan di lapangan, perlu dikeluarkan petunjuk yang jelas tentang masalah bahasa pengantar di sekolah, termasuk kedudukan bahasa daerah sebagai pembantu bahasa pengantar di kelas-kelas awal sekolah dasar.
- (9) Dalam rangka peningkatan pengajaran sastra, perlu disusun kurikulum yang serasi.
- (10) Dalam rangka penerapan pendekatan makro, perlu disusun pedoman untuk kepala sekolah dan para guru. Tugas guru yang mengajarkan bidang studi nonbahasa adalah mengembangkan kemampuan murid dalam memahami uraian lisan dan bahan bacaan dalam bidang studi masing-masing dengan tepat. Juga diperlukan latihan melakukan sintesis, analisis, dan evaluasi konsep-konsep dalam bidang studi dengan bahasa yang tepat.
- (11) Perlu ada kebijaksanaan yang menyeluruh tentang pembinaan guru bahasa Indonesia. Untuk mendapatkan guru yang baik, perlu dipikirkan masalah mutu calon guru di SPG dan IKIP, masalah pengangkatan dan pembinaan karier melalui penataran dan pendidikan lanjutan.
- (12) Sehubungan dengan pendidikan luar sekolah, perlu ditingkatkan pemberantasan buta huruf Latin dan buta bahasa Indonesia.
- (13) Dalam rangka pembinaan bahasa daerah, perlu diberikan tempat dan waktu yang wajar padanya dalam kurikulum sekolah.
- (14) Mutu pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, perlu segera ditingkatkan dengan tujuan memungkinkan penggunaannya sebagai sarana penggalan kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta sarana komunikasi antarbangsa.

III. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kaitannya dengan Bidang Komunikasi

a. *Kesimpulan Umum*

Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa memiliki pengaruh yang luas dalam masyarakat. Dalam hubungan itu media massa telah memberikan sumbangan yang berharga dalam pertumbuhan bahasa Indonesia. Akan tetapi, kenyataan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun lisan. Misalnya, ada kata yang cenderung kehilangan maknanya yang sesungguhnya dalam ragam lisan belum ada lafal baku. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih dipakai bahasa daerah atau bahasa asing.

b. *Tindak Lanjut*

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Untuk mencegah erosi bahasa perlu diadakan penelitian mendalam tentang sebab-sebabnya.
- (2) Kerja sama antara wartawan dan ahli bahasa dalam penumbuhan bahasa Indonesia perlu digalakkan.
- (3) Perlu diadakan penataran bahasa Indonesia untuk wartawan surat kabar, televisi, dan radio, baik pemerintah maupun swasta.
- (4) Pejabat negara, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam segala jenjang hendaknya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang lebih cermat, baik dalam komunikasi resmi maupun dalam pergaulan sehari-hari.
- (5) Perlu dipikirkan kemungkinan penempatan ahli-ahli bahasa di kantor-kantor Pemerintah dan swasta untuk memantapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan masing-masing.
- (6) Sebaiknya, surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia menyediakan "Pojok Bahasa" yang memuat petunjuk praktis penggunaan bahasa Indonesia.
- (7) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bersama dengan Dewan Pers

dan lembaga lain hendaknya segera menyusun pedoman lafal baku bahasa Indonesia yang didasarkan atas penelitian antara lain untuk penyiar televisi dan radio.

- (8) Sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pers, televisi, serta radio dapat melakukan kerja sama yang lebih efektif dalam usaha keefisienan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan baku.

IV. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Kesenian

a. Kesimpulan Umum

Bahasa Indonesia yang dipergunakan di dalam banyak karya sastra, cerita anak-anak, lagu, teater, dan film menunjukkan adanya ketimpangan. Dalam hal sastra dan buku anak-anak, hal itu disebabkan oleh penggunaan bahasa yang kurang sempurna dari kebanyakan pengarang kita, di samping masih tidak pastinya peranan redaktur dalam penerbitan.

Dalam hal penerbitan cerita anak-anak, pengarang perlu memberi keleluasaan kepada penerbit untuk mengubah bahasa karangannya agar sesuai dengan usia dan lingkungan anak-anak. Bacaan anak-anak memegang peranan penting dalam usaha peningkatan imajinasi dan kecerdasan anak; dengan demikian kecermatan pemakaian bahasa merupakan faktor yang sangat penting. Dalam syair lagu ketimpangan itu antara lain diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang pasti tentang aksen bahasa Indonesia sehingga para komponis tidak mempunyai pegangan untuk menyesuaikan dengan melodi.

Pemakaian bahasa Indonesia dalam film belum dilakukan sebaik-baiknya sebab film lebih banyak merupakan barang dagangan pemburu keuntungan bagi pengusaha; penulis skenario yang dipilihnya kebanyakan tidak menguasai teknik penulisan yang baik.

Bahasa Indonesia semakin banyak juga dipergunakan untuk menerjemahkan karya sastra tradisional dan teater tradisional. Usaha untuk menyebarluaskan jangkauan teater tradisional dengan cara mengindonesiakan cakupannya kadang-kadang justru menurunkan mutu teater yang bersangkutan karena terjadinya ketidakseimbangan dalam struktur teater itu sendiri. Oleh karena itu, pengondonesiaan teater tradisional harus dilakukan secara teliti dengan melibatkan lembaga kebahasaan, lembaga pendidikan dan pengembangan kesenian, dan seniman.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Mengefektifkan pengajaran sastra di sekolah-sekolah.
- (2) Menyediakan perpustakaan yang lengkap dan memadai.
- (3) Menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah.
- (4) Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Merangsang penelitian dan pendalaman karya-karya sastra daerah yang bersangkutan.
- (6) Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia atau daerah.
- (7) Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra Indonesia dan daerah ke dalam bahasa-bahasa asing.
- (8) Menyusun suatu kebijaksanaan perbukuan secara nasional sehingga setiap warga negara dapat memperoleh kesempatan membaca buku dengan mudah dan murah.
- (9) Menggiatkan dan merangsang kreativitas para sastrawan kita dengan menyediakan sarana untuk itu, misalnya berupa majalah sastra dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah.
- (10) Mengadakan kegiatan pertemuan antara sastrawan, ahli sastra, dan calon penggemar sastra (dalam rangka memasyarakatkan apresiasi sastra).
- (11) Mewajibkan para penerbit memiliki editor.
- (12) Mengadakan penataran untuk tenaga editor.
- (13) Menggunakan tenaga editor yang diakui oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- (14) Melakukan perekaman teater tradisional untuk kemudian diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (15) Mengadakan penelitian mengenai penggunaan syair untuk lagu-lagu Indonesia, yang hasilnya dapat digunakan sebagai pengarah penciptaan lagu.
- (16) Melakukan penelitian kembali terhadap kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang sudah ada, dan apabila ada kaidah yang sudah tidak sesuai lagi, maka kaidah itu sebaiknya diperbaiki.

- (17) Memberi rangsangan kepada pengarang-pengarang yang menyumbangkan tulisan-tulisan berharga kepada media massa.
- (18) Meningkatkan kecermatan pemakaian bahasa dalam bacaan anak-anak, termasuk penyesuaian dengan usia anak-anak.
- (19) Menumbuhkan kerja sama antara penerbit bacaan anak-anak dengan lembaga-lembaga pendidikan dan psikologi yang ada.
- (20) Perpustakaan sekolah hendaknya benar-benar terbuka bagi anak didik.

V. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kaitannya dengan Bidang Linguistik

a. Kesimpulan Umum

Bahasa Indonesia yang dipakai oleh semua lapisan masyarakat menunjukkan perkembangan berbagai ragam bahasa yang kaidah-kaidahnya lebih rumit daripada yang disangka orang. Kaidah bahasa yang tercantum dalam buku tata bahasa dan yang diajarkan di sekolah, tidak sepenuhnya lagi mencerminkan kenyataan orang berbahasa dewasa ini. Ketidakteraturan antara kaidah dan pemakaian bahasa yang beragam-ragam itu kadang-kadang melahirkan keangsan orang dalam pemakaian bahasa yang baik dan benar.

Usaha agar Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan diterapkan secara sadar dan mantap oleh berbagai golongan dan lingkungan masyarakat dalam ragam bahasa tulisan belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Pengembangan kosa kata Indonesia yang tidak dilandasi oleh wawasan bahasa yang baik kadang-kadang menjurus ke pertumbuhan yang kurang teratur.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Penguasaan kaidah ejaan resmi dan lafal yang baku perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat luas, termasuk instansi Pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan, dan sarana komunikasi massa.
- (2) Tata bahasa yang menggambarkan norma-norma bahasa adab dengan cara yang memadai perlu mendapat prioritas utama dalam kegiatan pengembangan bahasa Indonesia. Tata bahasa deskriptif itu kemudian dijabarkan untuk pelbagai tujuan pedagogis atau tujuan praktis.

- (3) Kamus baku bahasa Indonesia perlu segera diterbitkan dan disebarluaskan. Untuk tujuan itu penelitian di bidang leksikologi perlu dilaksanakan dan para ahli berbagai bidang ilmu pengetahuan diikutsertakan.
- (4) Kerja sama penelitian antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan lembaga pendidikan tinggi perlu ditingkatkan.
- (5) Akronim yang dipakai di luar lingkungan khusus hendaknya disertai bentuk lengkapnya jika mungkin terjadi gangguan komunikasi.
- (6) Pembakuan dan modernisasi segala segi bahasa Indonesia perlu digalakkan dengan tujuan peningkatan penggunaan bahasa Indonesia baku di dalam segala kegiatan pemakaiannya.
- (7) Perlu diadakan penelitian mengenai berbagai segi bahasa Indonesia, seperti penggunaan kata ganti dan sapaan dalam hubungan dengan demokratisasi masyarakat.
- (8) Perlu diatur transliterasi tulisan Arab untuk kepentingan keagamaan, ilmiah, dan umum.

VI. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kaitannya dengan Bidang Ilmu dan Teknologi

a. Kesimpulan Umum

Oleh karena antara bahasa dan alam pemikiran manusia terdapat jalinan yang erat, maka keberhasilan dari pemodernan itu sangat bergantung kepada corak alam pemikiran manusia Indonesia yang merupakan hasil sintesis antara nilai-nilai yang berakar pada kebudayaan etnis yang tradisional dan nilai-nilai kebudayaan yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Proses sintesis itu dipikirkan sebagai suatu proses yang mempertinggi potensi kreatif yang dapat menjelaskan suatu kebudayaan yang khas Indonesia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi modern merupakan faktor penting dalam modernisasi, serta pengenalan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dimasyarakatkan secara luas. Pemasyarakatannya ini hanya dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien apabila bahasa berfungsi sebagai penyebar konsep-konsep ilmu pengetahuan dan teknologi itu.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemakai bahasa keilmuan di Indonesia adalah ketidakseragaman istilah dan penamaan dalam satu bidang disiplin sekalipun. Di dalam masing-masing disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat kecenderungan untuk membuat istilah-istilah dan tata nama yang ber-

beda-beda. Di samping ini perlu pula diperhitungkan adanya sistem tata nama internasional. Jadi, banyak istilah yang mudah dibuat di dalam suatu kalangan tidak diketahui oleh kalangan itu.

Pengadaan buku pelajaran ilmiah dalam bentuk karya asli perlu digalakan. Potensi ke arah ini sudah kelihatan mulai berkembang. Faktor-faktor penghambat tampaknya terletak antara lain di luar bidang ilmiah, misalnya.

- a. kreativitas di bidang lain adalah lebih produktif secara material;
- b. uluran tangan dari pihak Pemerintah hingga saat ini belum mencapai hasil yang diinginkan.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang ilmu seperti ilmu hukum banyak yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena bahasa keilmuan itu harus bermakna tunggal, pemakaian bahasa Indonesia harus diperbaiki dan dibakukan.

Penggunaan akronim hendaklah terbatas pada lingkungan kedinasan yang bersangkutan saja. Penggunaan akronim di luar lingkungan kedinasan yang bersangkutan, misalnya di dalam media massa hendaklah dihindari. Apabila akronim digunakan di luar lingkungan kedinasan yang bersangkutan, akronim itu hendaklah dilengkapi dengan bentuk penuhnya.

Dasar dan penamaan bilangan di dalam bahasa Indonesia perlu ditinjau kembali.

Untuk kepentingan pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam bidang peristilahan, bahasa asing yang diutamakan sebagai bahasa sumber adalah bahasa Inggris.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Usaha pemodernan bahasa Indonesia hendaknya memperhatikan tercapainya keselarasan dengan :
 - a. nilai-nilai yang telah memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern;
 - b. nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan etnis.
- (2) Pemerintah dan masyarakat ilmuwan perlu berusaha untuk segera menyelaraskan peristilahan, baik dalam satu disiplin maupun antardisiplin yang berdekatan dan agar istilah-istilah internasional digunakan di samping istilah-istilah bahasa Indonesia.

- (3) Dalam semua jenjang pendidikan, khususnya sejak sekolah lanjutan, perlu diusahakan keseimbangan antara pendidikan bahasa, matematika, dan logika supaya pemikiran bangsa Indonesia dapat mengimbangi kemajuan zaman.
- (4) Supaya Pemerintah menumbuhkan satu badan khusus yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penerjemah.
- (5) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya mendukung usaha swasta di bidang penerjemahan yang telah nyata-nyata menunjukkan kemampuan.
- (6) Untuk penulisan karya asli dan saduran tidak perlu ditentukan "target". Cukuplah kalau disusun daftar bidang-bidang yang perlu digarap dan penulisannya ditawarkan kepada orang-orang yang dianggap ahli. Penulis hendaknya dibebaskan dari tugas rutinnya (*sabbatical leave*). Sehubungan dengan penulisan karya asli ini, perlu diadakan latihan penulisan buku (*textbook writing*).
- (7) Pengadaan pedoman khusus untuk pembentukan istilah-istilah dan tata nama dalam masing-masing bidang ilmu hendaknya dijabarkan dari pedoman umum pembentukan istilah yang telah disepakati.
- (8) Desimal hendaklah dinyatakan dengan titik (.), bukan koma (,) sehingga, misalnya 0,9 menjadi 0.9.
- (9) Sebagai pengejawantahan Kongres Bahasa Indonesia III agar pada awal Pelita III digalakkan penerjemahan besar-besaran.
- (10) Agar dibentuk badan pertimbangan yang anggotanya terdiri dari para ahli pelbagai bidang ilmu yang bekerja dalam dua tahap, yaitu untuk:
 - (a) memilih dan menyebarkan istilah dan
 - (b) menampung pendapat (tanggapan) masyarakat serta menetapkan istilah yang akan dipakai.
- (11) Penanaman bilangan besar Amerika -- yang sama dengan penamaan bilangan besar dalam bahasa Prancis dan Rusia -- hendaklah dijadikan dasar penamaan bilangan dalam bahasa Indonesia (contoh: miliun, biliun, triliun, dan seterusnya).
- (12) Bahasa Indonesia dianjurkan menggunakan sistem penamaan bilangan antara sepuluh dan dua puluh yang digunakan di Indonesia bagian timur, yang lebih mudah diterima oleh anak-anak, di samping menggunakan sistem yang berlaku sekarang.

- (13) Pengejaan nama bilangan hendaknya dilakukan dengan mengingat fungsi aditif dan multiplikatif angka-angka yang terdapat dalam tubuh lambang bilangan itu. Yang bersifat aditif ditulis terpisah, sedangkan yang bersifat multiplikatif dirangkaikan (Contoh: 23 = duapuluh tiga).
- (14) Penggunaan angka 2 untuk menyatakan kata ulang dan penggunaan huruf x di dalam ejaan bahasa Indonesia (Ejaan yang Disempurnakan) sebaiknya ditinjau kembali.

Jakarta, 3 November 1978

KEPUTUSAN KONGRES BAHASA IV

Pendahuluan

Kongres Bahasa Indonesia IV berlangsung dari hari Senin tanggal 21 November 1983 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 November 1983 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dan diikuti oleh tokoh-tokoh lembaga pemerintahan, departemen dan nondepartemen, organisasi profesi, guru, mahasiswa, para ilmuwan yang mewakili pelbagai bidang ilmu dan teknologi, serta peminat lain dari dalam dan luar negeri. Dengan memperhatikan pidato pengarahan dalam peresmian pembukaan Kongres Bahasa Indonesia IV oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, pada tanggal 21 November 1983, serta setelah mendengarkan makalah-makalah yang disajikan dan dibahas secara seksama baik di dalam sidang-sidang lengkap maupun di dalam sidang-sidang kelompok, Kongres Bahasa Indonesia IV mengambil keputusan yang berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah-masalah dalam bidang bahasa, pengajaran bahasa, dan pembinaan bahasa dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, yaitu:

1. sarana komunikasi pemerintahan dan kemasyarakatan;
2. sarana pengembangan kebudayaan;
3. sarana pendidikan dan pengajaran, termasuk wajib belajar; serta
4. sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut.

A. Bidang Bahasa

1. *Kesimpulan Umum*

Apabila dilihat dari saat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada tahun 1928 sampai dengan saat perkembangannya dewasa ini, bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dan kemajuan yang pesat. Fungsi bahasa Indonesia telah makin mantap,

tidak hanya sebagai alat komunikasi sosial dan administratif tetapi juga sebagai alat komunikasi ilmu dan keagamaan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia telah memiliki poros inti yang cukup besar dan cukup terpadu, yang memungkinkan manusia dari satu latar belakang bahasa di Tanah Air berkomunikasi dengan manusia dari latar belakang bahasa yang lain. Sebagai alat penyebar ilmu, bahasa Indonesia telah dapat pula menjalankan fungsinya dengan baik, yang terbukti dengan makin banyaknya buku ilmu pengetahuan tingkat tinggi yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagai alat pengungkap rasa dan ilmu yang tumbuh dan terus berkembang, bahasa Indonesia tentu saja tidak terhindar dari sentuhan dan pengaruh masyarakat yang memahaminya, baik berupa perubahan nilai dan struktur maupun berupa tingkah laku sosial lainnya. Pada satu pihak, hubungan timbal balik antara bahasa sebagai alat pengungkap dengan alam sekitar dan fenomena sosial sebagai isinya menambah kekayaan linguistik bahasa Indonesia yang merupakan milik kita bersama. Pada pihak lain, persentuhan ini menimbulkan pula keanekaragaman. Tanpa pembinaan yang hati-hati dan seksama, tidak mustahil sebagian ragam-ragam itu menyimpang terlalu jauh dari poros inti bahasa kita.

Selaras dengan ragam yang menyimpang itu, terdapatlah cukup banyak pemakai bahasa Indonesia yang belum dapat mempergunakan bahasa itu dengan baik dan benar. Termasuk di antara mereka adalah para mahasiswa dan pengajar di perguruan tinggi, para cendekiawan, dan para pemimpin yang menduduki jabatan yang berpengaruh. Hal ini tampak, antara lain, pada :

1. pemakaian kalimat, tanda baca, dan pengelompokan wacana yang tidak mengungkapkan jalan pikiran yang jernih, logis, dan sistematis;
2. pemakaian istilah asing untuk menggantikan kosa kata yang telah ada, yang memiliki ciri-ciri semantik yang sama, dan yang telah umum dipakai;
3. pemakaian istilah teknis yang tidak seragam dalam ilmu pengetahuan;
4. pengucapan kata yang menyimpang dari kaidah yang dianggap baku;

5. pengejaan kata atau frase yang tidak taat asas.

2. *Tindak Lanjut*

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

1. Perlu segera disusun tata bahasa baku bahasa Indonesia sebagai tata bahasa acuan yang lengkap dengan memperhatikan berbagai ragam bahasa Indonesia, baik ragam tulis maupun ragam lisan.
2. Perlu segera disusun kamus besar bahasa Indonesia yang memuat tidak hanya bentuk-bentuk leksikon tetapi juga lafal yang dianggap baku, kategori sintaktik setiap kata, dan batasan serta contoh pemakaian yang lebih lengkap. Jika mungkin, kamus ini perlu dilengkapi dengan gambar dan keterangan mengenai asal kata.
3. Perlu dipergiat penulisan kamus bahasa daerah yang merupakan sumber untuk memperkaya bahasa nasional.
4. Perlu diigiatkan penulisan dan penerjemahan buku-buku yang bermanfaat bagi pelbagai bidang.
5. Lembaga-lembaga pemerintah (departemen dan nondepartemen) dan instansi-instansi swasta yang berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan dihimbau agar mengadakan kerja sama untuk menyeragamkan istilah-istilah ilmu pengetahuan. Pembentukan dan penyeragaman istilah serta tata nama hendaknya dibuat dengan kerangka pemerian bahwa istilah-istilah itu perlu memenuhi selera naluri para pemakainya sehingga dapat benar-benar diterima dan dipakai. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditugasi mengkoordinasikan kerja sama itu dan menyebarluaskan hasilnya.
6. Sikap hati-hati dalam memilih unsur-unsur dari bahasa lain, terutama bahasa asing, perlu ditingkatkan.
7. Semua mahasiswa harus mendapat latihan keterampilan menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia.
8. Perlu ditetapkan pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam huruf Latin bahasa Indonesia.

B. Pengajaran Bahasa

1. *Kesimpulan Umum*

Tujuan umum pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jika ditinjau dari sudut penutur bahasa Indonesia, tujuan umum pengajaran bahasa Indonesia adalah :

1. tercapainya pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi, yaitu pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
2. tercapainya pemilikan keterampilan yang baik dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan pengetahuan yang sah;
3. tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap yang erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab, yang tampak dari perilaku sehari-hari.

Sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia serta sesuai dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional ialah (1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, (2) sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang lembaga pendidikan, (3) sebagai bahasa penalaran, dan (4) sebagai bahasa pengungkap pengembangan diri hasil pendidikan.

Sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, bahasa Indonesia yang diajarkan adalah :

1. bahasa dengan ciri serta syarat ragam bahasa baku, baik ragam lisan maupun ragam tulis;
2. bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa kebudayaan, yang berfungsi sebagai bahasa modern.

Sebagai bahasa pengantar, penalaran, dan pengungkap pengembangan diri, bahasa Indonesia yang dipakai di lembaga pendidikan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. mempunyai kemampuan menjalankan tugas sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien, yaitu mempunyai kemampu-

an menyampaikan informasi secara tepat dengan berbagai konotasi;

2. mempunyai bentuk estetik;
3. mempunyai keluwesan sehingga dapat dipergunakan untuk mengekspresikan makna-makna baru;
4. mempunyai ragam yang sesuai dengan jenjang lembaga pendidikan.

Kedua bahasa di Indonesia yang sangat majemuk dengan adanya bahasa-bahasa daerah yang banyak, yang tersebar di seluruh tanah air, belum dimanfaatkan dalam pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia.

Dalam pengajaran bahasa Indonesia belum diperhatikan sifat komunikatif bahasa dengan memanfaatkan berbagai komponen komunikasi, baik sebagai bahasa yang dipakai dalam proses pengajaran maupun sebagai hasil pengajaran itu sendiri.

Pengajaran sastra di sekolah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran bahasa belum mencapai tujuan yang sesuai dengan fungsinya sebagai pengembang wawasan nilai kehidupan dan kebudayaan.

Pola kebijaksanaan nasional mengenai pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran pada dasarnya adalah sebuah strategi yang memandu pendidik bahasa Indonesia di dalam mengembangkan tindakan yang mendasar dalam memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran.

2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

1. Dengan memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia III, diusulkan agar mutu pengajaran bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang pendidikan ditingkatkan dengan berbagai macam upaya, seperti (a) peningkatan kemampuan guru bahasa Indonesia, (b) pengembangan bahan pelajaran yang sesuai dengan fungsi komunikatif dan integratif bahasa, kebudayaan, serta penalaran, dan (c) pemberian pengalaman belajar kepada siswa

untuk memperoleh keterampilan dalam proses belajar bahasa Indonesia.

2. Dengan tujuan mamantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran, pola kebijaksanaan nasional kebahasaan harus disusun. Dengan pola ini perlu dilakukan berbagai tindakan taktis yang terdiri dari (a) penentuan strategi pengajaran guna membentuk keterampilan berbahasa yang secara berangsur-angsur diikuti dengan sajian pengetahuan kebahasaan pada tingkat-tingkat lanjut pada pendidikan dasar dan menengah, (b) pengembangan tata bahasa anutan, (c) penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar, (d) pemantapan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai persyaratan untuk berbagai macam kenaikan tingkat/pangkat, dan (e) pemanfaatan media massa sebagai model penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Pengajaran sastra Indonesia harus lebih ditekankan agar dapat membantu terlaksananya unsur humaniora dalam kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan.
4. Bahan pelajaran bahasa Indonesia perlu mencakup latihan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam rangka mengimbangi laju perkembangan karya ilmiah, pengajaran membaca cepat perlu dikembangkan secara khusus.
5. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia hendaklah memanfaatkan organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan pada tingkat pedesaan dengan tujuan agar (a) pembangunan nasional di bidang kebudayaan, khususnya sektor kebahasaan, berlangsung secara efektif dan efisien dan (b) kemampuan warga masyarakat dalam bidang kebahasaan dapat meningkat.
6. Pembinaan apresiasi sastra perlu dilaksanakan sedini mungkin mulai dari tingkat prasekolah sampai ke perguruan tinggi dan di lingkungan keluarga.
7. Di samping pengajaran bahasa Indonesia yang ditujukan kepada kemampuan berbahasa secara umum di sekolah dasar dan menengah, perlu dikembangkan bahan pengajaran bahasa yang diperlukan bagi bidang-bidang khusus.

8. Pendidikan dalam suasana kedwibahasaan yang strateginya bertujuan menjamin hak hidup bahasa dan kebudayaan daerah hendaknya mempunyai nilai positif.
9. Di dalam kurikulum lembaga pendidikan tinggi hendaknya dimasukkan program pendidikan bahasa Indonesia.
10. Hasil penelitian kebahasaan dan pengajaran bahasa hendaklah disebarluaskan dan dimanfaatkan.
11. Pelaksanaan wajib belajar perlu dimanfaatkan untuk menyukseskan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

C. Pembinaan Bahasa

1. *Kesimpulan Umum*

Pembangunan nasional kita pada hakikatnya adalah usaha mengadakan perubahan dalam segala segi kehidupan bangsa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan nasional itu akan banyak tergantung pada kemampuan bahasa Indonesia memenuhi fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di samping kemampuan bangsa kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kenyataan yang dihadapi oleh para pembina bahasa ialah pemakaian bahasa Indonesia di dalam masyarakat, khususnya di lembaga-lembaga, badan-badan, dan organisasi-organisasi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara, yang belum menggembirakan.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam ilmu, seperti ilmu hukum dan ilmu administrasi, banyak yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Karena bahasa keilmuan itu harus bermakna tunggal, pemakaian bahasa Indonesia harus terus diperbaiki dan usaha pembakuannya ditingkatkan.

Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa mempunyai pengaruh yang luas di dalam masyarakat. Kenyataan juga menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun secara lisan, masih memiliki kelemahan. Kecende-

rungan menghilangkan kata-kata tertentu dalam media cetak, misalnya, sering mengakibatkan makna kalimat menyimpang atau hilang sama sekali. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih ada pemakaian unsur-unsur bahasa daerah atau bahasa asing yang tidak perlu.

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sehari-hari oleh masyarakat menunjukkan peningkatan yang pesat dan jumlah orang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama semakin meningkat. Namun, tingkat kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar masih perlu mendapat perhatian para pendidik dan pemakai bahasa Indonesia.

2. *Tindak Lanjut*

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan bahasa Indonesia dalam semua bidang, terutama bidang hukum dan perundang-undangan, perlu segera digarap secara sungguh-sungguh, bertahap, dan terpadu karena hukum yang dimengerti oleh setiap anggota masyarakat akan lebih menjamin terlaksananya pembangunan nasional secara mantap, lancar, dan tertib.
2. Semua aparat pemerintah, terutama yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan hukum, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang memadai sehingga hukum/undang-undang yang dihasilkan dan yang harus dilaksanakan itu mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.
3. Semua petugas pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti lurah, guru, juru penerangan, penyiar RRI/TVRI, dan staf redaksi media cetak, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu cara yang perlu segera ditempuh ialah bahwa setiap departemen, lembaga nondepartemen, dan organisasi swasta merencanakan kegiatan kebahasaan sedemikian rupa sehingga setiap petugas atau anggota dalam badan itu sekurang-kurangnya memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kebutuhannya dalam melaksanakan tugas pembangunan.

4. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah yang memungkinkan terciptanya suasana atau iklim kebahasaan sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi utama di negara Republik Indonesia. Kata atau istilah asing yang tidak perlu, terutama dalam bidang dunia usaha (nama badan usaha, iklan, dan papan pengumuman untuk masyarakat luas), harus segera diusahakan penggantinya dengan kata/atau istilah bahasa Indonesia. Dalam kaitan itu, kerja sama yang terpadu antara berbagai instansi (Departemen Kehakiman, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan departemen lain, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga masyarakat) sangat diperlukan.
5. Generasi muda perlu dibekali dengan sikap dan disiplin berbahasa yang dapat dibanggakan.
6. Guna menunjang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan oleh berbagai instansi, baik Pemerintah maupun swasta, perlu direncanakan penugasan para ahli bahasa atau pemanfaatan ahli bahasa secara maksimum pada berbagai sektor pembangunan.
7. Usaha pembinaan bahasa Indonesia secara lebih intensif perlu dilakukan dan diberi prioritas pertama di daerah-daerah yang tingkat keahamannya berbahasa Indonesia masih rendah.
8. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa perlu dimantapkan. Salah satu cara yang mudah ialah menghindari, sekurang-kurangnya mengurangi, pemakaian kata-kata asing dan bahasa daerah dalam hal atau peristiwa yang bersifat nasional.
9. Kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu ditingkatkan terus, terutama dalam Bulan Bahasa (bulan Oktober setiap tahun).
10. Kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia para guru, terutama guru bahasa Indonesia, perlu ditingkatkan terus, di samping usaha meningkatkan mutu pengajaran bahasa Indonesia.

11. Buku-buku yang diterbitkan—baik yang asli maupun yang terjemahan—, surat kabar dan majalah yang diedarkan, serta bahan koleksi perpustakaan hendaklah diusahakan agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
12. Usaha pembinaan bahasa Indonesia perlu direncanakan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga sikap dinamika dan disiplin berbahasa yang baik serta keterampilan berbahasa Indonesia para pemakai bahasa dari seluruh lapisan masyarakat dapat ditingkatkan secara mantap. Guna memungkinkan tercapainya tujuan itu, jalur-jalur formal, nonformal, dan informal perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, usaha memasyarakatkan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, dan kamus bahasa Indonesia baku perlu dilakukan dengan cara yang lebih baik agar buku-buku pedoman dan buku-buku acuan itu dapat mencapai dan dijangkau masyarakat luas.
13. Unsur-unsur bahasa daerah merupakan potensi yang penting dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini, pemanfaatan unsur-unsur bahasa daerah yang dimaksudkan untuk memperkaya bahasa Indonesia itu hendaklah dilakukan secara lebih cermat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri maupun terhadap perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keampuhan bahasa Indonesia sebagai lambang pemersatu bangsa harus tetap terjamin dan ketahanan nasional tidak boleh terganggu karena banyaknya unsur bahasa daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia.
14. Hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia yang telah dicapai oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditunjang dengan instruksi pelaksanaan pada setiap departemen, lembaga, dan organisasi.
15. Kongres Bahasa Indonesia IV memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia III agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga non-departemen supaya wibawa dan ruang geraknya dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia lebih berdayaguna.

16. Kongres mengusulkan agar bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam konsep Wawasan Nusantara karena bahasa Indonesia merupakan unsur utama kebudayaan nasional dan sekaligus berfungsi sebagai sarana komunikasi utama dan pemersatu dalam kehidupan bangsa dan negara.
17. Dalam sensus penduduk Indonesia yang akan datang perlu diperoleh data kebahasaan yang sah dan lengkap. Data yang demikian diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.
18. Kongres menugasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk memonitor pelaksanaan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia IV dan melaporkan hasilnya kepada Kongres Bahasa Indonesia V yang akan datang.
19. Ketentuan mengenai lalu lintas buku dan barang cetakan lain yang tertulis dalam bahasa Indonesia, terutama di kawasan ASEAN, perlu ditinjau kembali.

Jakarta, 26 November 1983

PUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA V

Pendahuluan

Kongres Bahasa Indonesia V yang pembukaannya diadakan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 1988 yang sidang-sidangnya berlangsung hingga hari Kamis tanggal 3 November 1988 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dengan memperhatikan pidato peresmian pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto, pada tanggal 28 Oktober 1988, pidato pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan, pada tanggal 29 Oktober 1988, dan setelah memperhatikan laporan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Anton M. Moeliono, serta mendengarkan dan membahas secara saksama makalah yang disajikan, baik dalam sidang lengkap maupun dalam sidang kelompok, yang berkaitan dengan:

a. garis haluan:

1. perencanaan bahasa (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing);
2. pengajaran;
3. bahasa Indonesia di luar jalur formal;
4. sarana penunjang;
5. kerja sama kebahasaan dalam dan luar negeri;
6. pembinaan sumber daya manusia dalam pengembangan bahasa Indonesia;
7. penerjemahan;

b. ranah pemakaian bahasa:

1. bahasa dan penalaran;

2. bahasa dan ungkapan rasa;
3. bahasa dan kreativitas;
4. peran bahasa Indonesia dalam pembangunan ilmu;
5. peran bahasa daerah dalam pengajaran bahasa Indonesia;
6. sumbangan dan hambatan bahasa asing dalam pengembangan bahasa Indonesia;
7. perkembangan bahasa Indonesia;
8. perkembangan penelitian bahasa Indonesia;
9. laporan penelitian;

c. pembangunan dan pengembangan sastra:

1. pemasyarakatan sastra;
2. sastra dalam pendidikan di sekolah dasar;
3. sastra dalam pendidikan di sekolah lanjutan;
4. pengembangan sastra;
5. penelitian sastra;
6. bahasa Indonesia sebagai bahasa sastra;
7. hubungan sastra Indonesia dan sastra daerah;
8. bahasa Indonesia dalam teater dan film;

d. bahasa Indonesia di luar negeri:

1. tinjauan dari luar negeri;
2. tinjauan dari dalam negeri;

telah mengambil putusan sebagaimana diperinci di bawah ini.

I. BAHASA

A. Simpulan Umum

Kedudukan bahasa Indonesia kini semakin mantap sebagai wahana komunikasi, baik dalam hubungan sosial maupun dalam hubungan formal. Pemakaian bahasa Indonesia sejak tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi menunjukkan kemantapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun, masih cukup banyak pemakai bahasa nasional kita yang belum mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai dengan konteks pemakaiannya. Karena itu, pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan diperluas. Demikian pula pene-

litian bahasa Indonesia perlu digalakkan sehingga pengembangan bahasa nasional akan terus berlandaskan temuan penelitian yang terarah dan terpadu.

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan simpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

1. Dalam konteks budaya yang memberi penekanan pada prinsip anutan, Kongres mengimbau agar para pejabat lebih berhati-hati dalam memakai bahasa Indonesia sehingga masyarakat mendapat masukan bahasa yang baik dan benar.
2. Karena media massa merupakan komunikator pembangunan yang memanfaatkan bahasa Indonesia, maka media massa seperti surat kabar dan majalah, hendaknya memiliki tenaga kebahasaan yang khusus membina bahasa siaran sehingga bahasa media massa dapat dijadikan contoh bagi masyarakat.
3. Dalam mengembangkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa ilmiah dan modern, janganlah penutur bahasa terjerumus membentuk sikap nasionalisme sempit yang berlebihan (chauvinisme). Bahasa Indonesia perlu dikembangkan dan dalam perkembangan itu penuturnya tidak usah takut untuk memungut kata baru, baik yang digali dari bumi sendiri maupun yang dari luar sesuai dengan keadaan dan keperluan.
4. Bahasa Indonesia hendaknya dimasukkan ke dalam delapan jalur pemerataan atau menjadi jalur kesembilan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pemberantasan buta bahasa Indonesia perlu digalakkan supaya tidak ada lagi dalam masyarakat Indonesia kelompok yang belum menikmati pemerataan pembangunan.
5. Untuk mengikuti perkembangan ilmu, kegiatan penerjemahan buku asing ke bahasa Indonesia perlu digalakkan. Para ahli bahasa dianjurkan mengadakan kerja sama dengan ahli informatika untuk menjajaki dan mengembangkan mesin penerjemahan. Pendidikan penerjemah dan penyediaan kamus istilah bidang ilmu menjadi prasyarat yang sangat penting.
6. Badan pemerintah yang mengeluarkan dokumen resmi, seperti undang-undang hendaknya memperhatikan kaidah bahasa Indonesia sehingga ragam bahasa bakunya dapat dicontoh masyarakat.

7. Politik perbukuan nasional perlu segera disusun karena penerbitan dan perbukuan di Indonesia yang tidak berkembang akan menghambat pembinaan dan pengembangan bahasa.
8. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang mempunyai unsur (1) kebanggaan pada bahasa, (2) kesetiaan pada bahasa, dan (3) kesadaran akan norma bahasa, masih perlu dipupuk.
9. Putusan Kongres Bahasa Indonesia IV mengenai penghapusan pemakaian bahasa asing pada papan nama gedung umum, seperti toko, dikukuhkan lagi, dengan menganjurkan kepada semua pemerintah daerah supaya lebih tegas dalam menerapkan peraturan mengenai hal tersebut.
10. Pengerahan, pembinaan, dan pendidikan tenaga kebahasaan—termasuk pengaderan—perlu dilakukan dengan berencana.
11. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat tentang konsep-konsep pembangunan harus menggunakan bahasa yang akrab, dan isi pesan pembangunan harus relevan dengan keperluan khalayak serta sesuai dengan daya tangkap masyarakat.
12. Untuk keperluan pengujian kemampuan berbahasa Indonesia, hendaknya disusun bahan ujian bahasa Indonesia yang bersifat nasional (yang sejenis dengan ujian TOEFL).
13. Penggunaan bahasa ilmiah yang tepat, lugas, dan logis di kalangan peneliti perlu dibiasakan.
14. Mengingat pembinaan umat beragama merupakan bagian yang penting dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan bahasa Indonesia merupakan sarana dalam kehidupan beragama, maka pengajaran bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan agama harus terus ditingkatkan dan harus dikoordinasi dengan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah umum.
15. Penelitian kebahasaan di Indonesia menghadapi banyak kendala, seperti perpustakaan yang belum memadai, tenaga peneliti yang perlu meningkatkan ilmunya, dan rendahnya kemampuan berbahasa asing peneliti. Instansi pendidikan tinggi diharapkan memperhatikan sarana fisik yang diperlukan dan mengusahakan peningkatan mutu peneliti sehingga penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan segala persyaratannya.
16. Dengan telah diterbitkannya *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa diharapkan dapat mengembangkan dan, jika perlu, menyempurnakannya.

17. Untuk buku pelajaran sekolah diperlukan penulisan tata bahasa yang sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memakai *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* sebagai acuannya.

II. SASTRA

A. Simpulan Umum

Sastra, jika ditinjau dari fungsinya, dapat memberikan kepuasan dan pendidikan bagi pembacanya. Jika diapresiasi dengan baik, karya sastra dapat menambah pengetahuan pembaca tentang kehidupan, pengenalan manusia, kebudayaan, kesenian, dan bahasa. Sastra dapat memberikan pelajaran yang praktis tentang berbagai cara menggunakan bahasa. Sastra juga mengembangkan imajinasi dan fantasi—suatu hal yang kerap dilupakan dalam peningkatan kualitas intelektual peserta didik dan pembaca pada umumnya. Karena itu, prosa, puisi, drama, dan karya sastra pada umumnya, selain dapat dijadikan wahana pengembangan dan penyebaran bahasa Indonesia yang kreatif dan dinamis, dapat pula meningkatkan kecerdasan dan memanusiakan manusia.

Bahasa yang dipergunakan di dalam banyak karya sastra menunjukkan adanya tumpang tindih kode ucap sastra yang kadang-kadang menyalahi kaidah bahasa yang baku. Hal itu disebabkan oleh keperluan penyampaian pikiran dalam karya sastra. Pada umumnya, bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra berbeda dari bahasa dalam karya yang bukan sastra. Karena itu, para pembaca patutlah menyadari hal itu agar tidak selalu ada kesalahpahaman dalam penerimaan maksud dan tujuannya.

Sastra dapat dimanfaatkan dalam pendidikan bangsa. Jadi, mutu karya sastra Indonesia dan daerah, perlu juga ditingkatkan. Penelitian dalam bidang sastra perlu digalakkan agar perkembangan, mutu, bahkan variasi sastra dapat tetap dipantau demi pembinaan dan pengembangan sastra pada umumnya.

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan simpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

1. Cara kongkret untuk menaikkan mutu dan jumlah karya sastra perlu diupayakan.

2. Pendidikan intelektual secara terencana dan terarah perlu dikembangkan agar dapat menumbuhkan selera intelektual dan sekaligus melahirkan minat baca sastra.
3. Tradisi pemasyarakatan sastra melalui forum pertemuan ilmiah, pementasan drama, serta pembacaan sajak dan novel perlu dirintis.
4. Keberanian mengajak semua lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengenal karya sastra perlu dikukuhkan kembali.
5. Untuk menarik minat pembaca terhadap sastra perlu diciptakan terbitan yang memperlihatkan "Wajah Indonesia dalam Sastra", yang merupakan hasil penelitian sastra Indonesia, dan "Sastra dan Budaya Bangsa", yang merupakan hasil penelitian sastra daerah. Kedua terbitan itu diharapkan dapat ditampilkan pada Kongres Bahasa Indonesia VI.
6. Perencanaan pembinaan dan pengembangan sastra dalam menentukan arah perkembangan sastra di Indonesia perlu disusun.
7. Buku teori dan kritik sastra yang relevan dengan karya sastra Indonesia, yang dapat dipakai sebagai acuan bagi para guru sastra dan peneliti sastra perlu disusun.
8. Penelitian puisi, prosa, dan drama perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan pola penelitian sastra yang menyeluruh, terpadu, dan bertahap, dengan program yang terperinci yang dapat memberikan gambaran ke-sastraan Indonesia.
9. Tenaga peneliti sastra perlu dididik dan dikembangkan wawasannya. Mata kuliah metode penelitian sastra sebaiknya diwajibkan di setiap perguruan tinggi yang mempunyai jurusan sastra dan bahasa agar tumbuh barisan peneliti yang berkualitas.
10. Kritikus sastra perlu disertakan dalam penyusunan kurikulum sekolah lanjutan untuk ikut menentukan karya-karya yang cocok bagi pengajaran.
11. Pemakaian seni pentas rakyat sebagai sarana pergaulan sastra daerah dan sebagai identitas masyarakatnya perlu ditingkatkan.
12. Para ahli sastra harus ikut bertanggung jawab atas perkembangan sastra.

III. PENGAJARAN BAHASA

A. Simpulan Umum

Tujuan pendidikan bahasa Indonesia adalah membina keterampilan peserta didikan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam upaya meningkatkan mutu manusia Indonesia sebagai bekal menghadapi kehidupan masa kini dan mendatang. Tujuan pendidikan bahasa Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional.

Dalam mencapai tujuan pendidikan bahasa Indonesia, kurikulum bahasa, buku pelajaran bahasa, metode belajar-mengajar bahasa, guru, lingkungan keluarga serta masyarakat, dan perpustakaan sekolah memegang peranan penting. Kurikulum bahasa harus luwes dan dapat mengembangkan kreativitas guru dalam kegiatan belajar-mengajar; isi dan cara penyajian buku pelajaran bahasa harus menarik dan menunjang pembinaan keterampilan berbahasa dengan baik dan benar; metode belajar-mengajar harus dapat menumbuhkan interaksi guru-peserta didikan sedemikian rupa sehingga mengembangkan didikan kekritisian, kekreatifan, serta keresponsifan peserta didikan dalam menghadapi pelajaran dan kehidupan; guru bahasa dan guru nonbahasa di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, serta lingkungan keluarga dan masyarakat, harus dapat memberikan teladan berbahasa dengan baik dan benar; dan jumlah serta jenis buku perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan.

Bahasa daerah di wilayah tertentu dapat dijadikan mata pelajaran tanpa mengganggu pendidikan bahasa Indonesia. Karena itu, kurikulum, buku pelajaran, metode pengajaran, dan sarana lain pendidikan bahasa daerah perlu dikembangkan.

Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah terutama dengan tujuan membina kemampuan memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diungkapkan dalam buku atau terbitan yang berbahasa asing.

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan simpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

1. Kurikulum bahasa yang berlaku di sekolah dasar dan menengah perlu segera disempurnakan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosiolinguistik bahasa serta keluwesan dan kesinambungan isi.
2. Pendidikan dan pengajaran bahasa hendaknya lebih menekankan keterampilan berbahasa dan aspek apresiasi sastra daripada aspek teori kebahasaan.

3. Buku pelajaran bahasa yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah dasar dan menengah perlu segera ditingkatkan isi, mutu, serta cara penyajiannya.
4. Untuk meningkatkan serta memperluas wawasan guru bahasa di sekolah dasar dan menengah perlu segera disusun dan dikembangkan berbagai buku acuan seperti buku panduan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata bahasa pedagogis, dan panduan pengajaran bahasa komunikatif. Di samping itu, penataran guru bahasa perlu ditingkatkan dalam hal pengelolaan, kurikulum, metode, penyusunan bahan pelajaran.
5. Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi di luar jurusan sastra Indonesia hendaknya merupakan kebijakan nasional dan dipadukan dalam mata kuliah dasar umum.
6. Para pembina pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perlu menjalin kerja sama dalam pengadaan bahan pengajaran dan pertukaran pengalaman dan informasi.
7. Pemerintah Indonesia perlu membantu pengembangan lembaga pendidikan di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dengan menjalin kerja sama, antara lain dengan ikut menyediakan tenaga pengajar Indonesia untuk mengajar di luar negeri, menyediakan bahan pengajaran, memberikan informasi kebahasaan yang mutakhir, dan memberikan kemudahan kepada para siswa yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia.
8. Pembentukan pusat pengkajian internasional tentang bahasa Indonesia perlu dipertimbangkan.

IV. PENGAJARAN SASTRA

A. Simpulan Umum

Simpulan umum yang ditetapkan dalam bidang pengajaran sastra adalah sebagai berikut.

1. Diperlukan kesempatan yang lebih luas untuk mendorong kreativitas guru dan peserta didik di dalam pelaksanaan pengajaran sastra agar fungsi kurikulum pengajaran bahasa Indonesia sebagai pedoman pengajaran tidak menjelma menjadi kendali yang terlalu ketat yang menghilangkan ruang gerak bagi inisiatif guru dan peserta didik.
2. Pengajaran sastra Indonesia sebagai pengajaran yang struktural fungsional

dibangun di atas landasan ilmu sastra yang relevan, hasil sastra, dan ilmu pendidikan.

3. Tujuan pengajaran sastra adalah menumbuhkan dan mengembangkan akal budi peserta didikan melalui kegiatan pengalaman sastra, yaitu berapresiasi dan berekspresi sastra, dan melalui kegiatan penelaahan masalah sastra sehingga timbul kegemaran membaca dan menghargai sastra sebagai sesuatu yang bermakna bagi kehidupan.
4. Bahan pengajaran sastra selayaknya mencakupi:
 - a. karya sastra, berupa cerita rekaan, puisi, dan drama, yang telah terpilih dari segi kualitas dengan mempertimbangkan keragaman dalam hal jenis, bentuk, tema, serta zaman, dan tingkat kesulitan serta kesesuaiannya dengan keadaan peserta didikan.
 - b. pengetahuan tentang sastra (teori dan sejarah sastra) sebagai perlengkapan berpikir peserta didikan yang berguna untuk memperoleh pengalaman dan penikmatan sastra yang lebih mendalam. Bahan tersebut dapat menghindari pengetahuan yang semata-mata teoretis yang menjadi beban hafalan.
5. Dalam pengajaran sastra diperlukan proses belajar-mengajar yang sekaligus melibatkan pengalaman, pengetahuan, dan penilaian peserta didikan terhadap sastra secara langsung sehingga terjadi interaksi dinamis antara peserta didikan, karya sastra, dan guru. Kegiatan belajar menjadi media untuk melahirkan dan menguji gagasan serta melakukan penerokaan dan pemikiran lebih lanjut tentang sastra dan hubungannya dengan kehidupan.
6. Guru sastra memerlukan keleluasaan mempersiapkan diri berupa membaca dan memilih karya sastra, menyusun bahan, dan menciptakan model pengajaran, serta melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya. Tugasnya mengajarkan sastra yang dirangkap dalam mengajarkan bahasa tidak dapat dijalankan dengan luasa. Karena itu, hendaknya diadakan pembagian tugas di antara para guru, yaitu guru yang bertugas sebagai pengajar sastra dan guru yang bertugas sebagai pengajar bahasa.
7. Para peserta didikan diwajibkan membaca karya sastra yang sudah terpilih sebagai bahan pengajaran sastra. Di dalam kelas peserta didikan diberi keleluasaan melahirkan pendapatnya sendiri. Dengan bimbingan guru peserta didikan menemukan butir persamaan dari pendapat itu dalam rangka membangun makna sastra bagi dirinya sendiri.

8. Tersedianya buku dan majalah yang berisi karya sastra, khususnya yang telah terpilih sebagai bahan pengajaran sastra, merupakan syarat untuk penyelenggaraan pengajaran sastra. Hendaknya di setiap sekolah tersedia bahan berupa karya sastra dengan jumlah yang mencukupi keperluan belajar peserta didikan.
9. Hubungan antara sastra Indonesia dan berbagai ragam sastra Nusantara sangat erat. Pengajaran sastra yang memperlakukan karya sastra Indonesia dan daerah dalam satu Wawasan Sastra Nusantara, akan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didikan akan Wawasan Nusantara.

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan simpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

1. Bahan pengajaran sastra selayaknya dikurangi sehingga ada keleluasaan bagi guru dan peserta didikan untuk melakukan pendalaman dan kreativitas.
2. Para guru perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan kegiatan membaca karya sastra dan meningkatkan kreativitasnya dalam mengajarkan sastra.
3. Di lingkungan sekolah perlu diambil inisiatif intern untuk mengadakan pembagian tugas di antara para guru sehingga pengajaran bahasa dan pengajaran sastra tidak dirangkap oleh seorang guru.
4. Hendaknya disusun senarai buku sastra (cerita rekaan, puisi, dan drama) yang wajib dibaca oleh peserta didikan pada setiap jenis dan jenjang sekolah. Buku karya sastra yang diwajibkan itu harus tersedia di setiap sekolah.
5. Perlu dilakukan penelitian dan penyusunan bahan pengajaran sastra untuk setiap jenis dan jenjang persekolahan.
6. Mengingat pengajaran drama di sekolah harus ditangani oleh orang yang mengerti dan mampu bermain drama, diusulkan agar dibuka jurusan drama di lembaga pendidikan tinggi yang memberikan kewenangan kepada lulusannya untuk menjadi guru drama di sekolah.

Jakarta, 3 November 1988.

**HASIL SIDANG MAJELIS BAHASA
BRUNEI DARUSSALAM – INDONESIA – MALAYSIA
TAHUN 1976–1989**

No.	Istilah	Jumlah	Sidang Majelis
1.	Kehutanan	655	VII, VIII, IX
2.	Pertanian	1.070	VII, VIII, IX
3.	Linguistik	2.586	VII, VIII
4.	Kesusastraan	506	VII, VIII
5.	Kependidikan	485	VII, VIII
6.	Teknik Sipil	470	VII, VIII, IX
7.	Fisika	1.088	VIII, IX, XXI
8.	Geografi dan Geologi	1.262	VIII, X
9.	Matematika	3.012	IX, XX, XXI
10.	Biologi	580	IX, XX
11.	Arsitektur	183	IX
12.	Agama Islam	525	X
13.	Kedokteran–Kesehatan	2.794	X, XI
14.	Olah Raga	1.617	X, XI
15.	Ekonomi	1.325	X, XI
16.	Manajemen	1.860	XI, XII
17.	Komunikasi Massa	1.266	XI, XIII
18.	Anatomi	1.245	XII, XIII
19.	Farmasi–Farmakologi	1.721	XII, XIII
20.	Psikologi	1.080	XII, XIII
21.	Teknik Mesin	1.759	XIII, XIV
22.	Mineralogi	1.060	XIII, XIV
23.	Antropologi	1.524	XIV, XV
24.	Sosiologi	1.779	XIV, XV

No.	Istilah	Jumlah	Sidang Majelis
25.	Statistika	1.130	XIV, XV
26.	Petrologi	2.929	XV, XVI
27.	Hukum Internasional	2.269	XV, XVI
28.	Hidrogeologi	854	XV, XVI
29.	Hidrologi	1.027	XV, XVI
30.	Meteorologi	1.940	XVI, XVII
31.	Ilmu Kependudukan	1.895	XVI, XVII
32.	Administrasi Niaga	2.414	XVII, XVIII
33.	Kesehatan Masyarakat	1.952	XVII, XVIII
34.	Ilmu Perpustakaan dan Dokumentasi	2.069	XVIII, XIX, XX
35.	Zoologi	1.898	XVIII, XIX
36.	Teknologi Makanan	2.288	XVIII, XIX
37.	Elektroteknik	1.419	XIX, XX
38.	Perkebunan	1.680	XIX, XX
39.	Fisika Dasar	701	XX
40.	Biologi ₁	1.432	XXI
41.	Hukum Laut	1.339	XXI, XXII
42.	Pelayaran	1.613	XXI, XXIII
43.	Kimia ₁	3.486	XXII, XXIII
44.	Biologi ₂	2.680	XXII, XXIII
45.	Penerbitan dan Percetakan	1.312	XXII, XXIII
46.	Fisika ₂	3.988	XXIII, XXIV
47.	Matematika ₂	1.059	XXIII
48.	Biologi ₃	3.616	XXIV
49.	Akuntansi	3.182	XXIV, XXV
50.	Biologi ₄	1.905	XXV
51.	Fisika ₃	761	XXV
52.	Kimia ₃	1.428	XXV
53.	Matematika ₄	3.951	XXV
54.	Biologi ₅	1.738	XXVI
55.	Ginekologi dan Obstetri	500	XVI
56.	Fisika ₄	243	XXVI
57.	Kimia ₃	609	XXVI
58.	Matematika ₅	94.594	XXVI, XXVIII

No.	Istilah	Jumlah	Sidang Majelis
59.	Fisika ₅	5.098	XXVII
60.	Kuangan	315	XXVII
61.	Kimia ₄	1.081	XXVII
62.	Biologi ₆	1.022	XXVII
63.	Biologi ₇	—	XXVIII
64.	Fisika ₆	1.015	XXVIII
65.	Kimia ₅	1.295	XXVIII
66.	Kuangan	334	XXVIII

PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PETA LOKASI
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

